SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu diatur pedoman klasifikasi arsip;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2012 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 1

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

POLA KLASIFIKASI

000 UMUM
000 Umum
001 Lambang
.1 Garuda
.2 Bendera Kebangsaan
.3 Daerah
.1 Propinsi
.2 Kabupaten
.4 Bandir/Umbul-umbul
002 Tanda Kehormatan/ penghargaan untuk Pegawai Lihat 861.1
.1 Bintang
.2 Satyalencana
.3 Satyakarya Nugraha
.4 Penghargaan Secara Adat
.5 Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
.6 Monumen
003 Hari Raya/Besar
.1 Nasional (17 Agustus,Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
.2 Hari Raya Keagamaan
.3 Hari Ulangtahun / HUT (Hari jadi Provinsi/Kabupaten/Kota)
.4 Hari-hari Besar Internasional
004 Ucapan
.1 Terimakasih
.2 Selamat
.3 Mohon diri
.4 Belasungkawa
.5 Ucapan lainnya
005 Undangan
006 Tanda Jabatan
.1 Pamong praja
.2 Pejabat lainnya
.3 Tanda Pengenal

010 URUSAN DALAM
011 Gedung kantor/termasuk Instalasi prasarana fisik
.1 Listrik
.2 Telepon

.3 Otomasi
.4 Air Minum
.5 Hidrant
.6 Alarm
.7 Internet

012 Rumah Dinas
.1 Tanah untuk Rumah Dinas
.2 Perabot Rumah Dinas
.3 Rumah Dinas Golongan I
.4 Rumah Dinas Golongan II
.5 Rumah Dinas Golongan III
.6 Rumah/Bangunan Lainnya
.7 Rumah Pejabat Negara

013 Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)

014 Rumah Susun/Apartemen

015 Peminjaman sarana dan prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop, dll)

016 Pengurusan Kendaraan Dinas

017 Keamanan/Ketertiban Kantor

018 Kebersihan Kantor

019 Protokol
.1 Upacara Bendera
.2 Tata Tempat
.1 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
.3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
.1 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
.2 Bandir/Umbul-umbul/Spanduk
.4 Penerimaan Tamu
.5 Kerjasama

020 BARANG DAN JASA

021 Penawaran
.1 Penawaran Barang
.2 Penawaran Jasa

022 Barang
.1 Barang Bergerak (Alat Angkutan)
.2 Barang Tidak Bergerak (ATK, Mesin Kantor dan Perabot Kantor)

023 Jasa

024 Pakaian Dinas

025 Senjata

027 Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukkan lelang, dsb.
.1 Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan / anwijzing, negosiasi, evaluasi
.2 SPK, Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran
.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

.4 Serah terima pekerjaan
.5 Pemeriksaan pekerjaan
.6 Perpanjangan waktu/force majoure
.7 Denda
.8 Sanggahan
.9 Pemeliharaan barang/jasa

028 Inventaris
.1 Pendataan Barang Milik Negara
.2 Pemeliharaan Barang Milik Negara
.3 Penghapusan Barang Milik Negara

030 KEKAYAAN DAERAH
031 Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032 Barang-barang tidak bergerak(gedung, asrama, monumen / bangunan bersejarah, dll)
033 Tanaman
034 Alat-alat berat
035 Hewan
036 Barang persediaan dalam gudang
037 Alat pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038 Peralatan Pabrik, Laboratorium
039 Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)

040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
041 Perpustakaan
.1 Pameran Bahan Perpustakaan
.2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
.3 Sirkulasi/Layanan
.1 Keanggotaan
.2 Peminjaman dan Pengembalian
.4 Deposit
.5 Pemeliharaan, Pelestarian/Alih Media
.6 Pembinaan Perpustakaan
.1 Bantuan Buku, Rak
.7 Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan
.8 Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar perpustakaan

.10 Taman Bacaan Masyarakat
042 Dokumentasi
043 Kunjungan ke Perpustakaan
045 Kearsipan
.1 Pola Klasifikasi
.2 Akuisisi Arsip
.3 Penyusutan Arsip
.1 Jadwal Retensi Arsip
.2 Penilaian Arsip
.3 Pemindahan Arsip

.4 Penyerahan Arsip
.5 Pemusnahan Arsip
.6 Berita Acara Penyusutan Arsip
.7 Daftar Pertelaan

.4 Pembinaan Kearsipan
.1 Pengawasan
.2 Bimbingan Kearsipan

.5 Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
.1 Fumigasi dan Termit Control
.2 Laminasi
.3 Alih Media

.6 Layanan

.7 Pemasyarakatan
.1 Pameran
.2 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
.3 Sosialisasi Kearsipan

.8 Pengembangan Sistem
.1 Sistem Kearsipan
.2 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

.9 Pengawetan

046 Sandi

047 Telegram, Telex, Radio, ISB

048 Data Elektronik

050 PERENCANAAN

Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementrian, Musrenbangnas, dan Musrenbangdes, Forum SKPD

.1 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
.1 RENSTRA (Rencana Strategi)
.2 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
.3 RENSTRA BAPPEDA

.2 Program Nasional
.1 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
.2 RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga)
.3 RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
.4 Rencana Kerja SKPD
.5 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
.6 Jawaban Gubernur atas pandangan fraksi
.7 Nota keuangan
.8 RKT (Rencana Kerja Tahunan)
.9 RKO (Rencana Kerja Operasional)

.3 Repelita
.1 Pelita Daerah
.2 Bantuan Pembangunan Daerah
.3 Bappeda

051 Laporan

.1 Laporan berkala
.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

052 Evaluasi
.1 Evaluasi Rencana Strategis
.1 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
.2 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
.3 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
.4 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

053 Proyek Bidang Pemerintahan
.1 Bidang Politik
.2 Bidang Keamanan dan Ketertiban
.3 Bidang Kesejahteraan Rakyat
.4 Bidang Perekonomian
.5 Bidang Pekerjaan Umum
.6 Bidang Pengawasan
.7 Bidang Kepegawaian
.8 Bidang Keuangan

060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
.1 Program Kerja

061 Organisasi
.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
.2 Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai

062 Organisasi Badan Non Pemerintah

063 Organisasi Badan Internasional

064 Organisasi semi pemerintah

065 Ketatalaksanaan
.1 Tata Naskah Dinas
.2 Stempel dinas dan stempel jabatan
.3 Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah
.4 Alamat-alamat kantor dan pejabat
.5 Ketentuan pakaian dinas dan atribut

066 Tata Hubungan Kerja

067 Standart Operasional Prosedur

068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan

069 Analisis Jabatan
.1 Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan Struktual dan Fungsional
.2 Uraian Jabatan

070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset

072 Pengembangan
.1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
.2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi, Cluster, Kab/Kota, desa, inovatif
.4 Inkubator Teknologi dan Bisnis
.5 Pameran produk inovasi/Ristek
.6 BTC (Bisnis Teknologi Center)

.7 Raptek (Penerapan Iptek)
.8 HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)

073 Kajian
.1 Kajian Strategis / Diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
.2 Seminar
.3 Workshop
.4 Rapat Koordinasi/Rapat Teknik
.5 Lokakarya
.6 Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian

074 Kerjasama Penelitian
.1 Instansi Pemerintahan Pusat/Daerah
.2 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
.3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
.4 Lembaga Internasional

075 Perekayasaan

076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)

077 Publikasi Ilmiah
.1 Jurnal Ilmiah

080 KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI

081 Gubernur

082 Bupati/Walikota

083 Komponen Eselon Lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)

084 Instansi lainnya (diluar Kemendagri)

085 Internasional di Dalam Negeri

086 Internasional di Luar Negeri

090 PERJALANAN DINAS

091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah

092 Perjalanan Menteri ke Daerah

093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)

094 Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas

095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah

096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri

097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri

098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri

099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

101 GDN (Gerakan Disiplin Nasional)

110 PEMERINTAHAN PUSAT

111 Presiden, Meliputi pencalonan,pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan
.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan / Pidato

112 Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan

113 Susunan Kabinet
.1 Reshuffle
.2 Penunjukan Menteri ad intern

.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1

114 Kementrian Dalam Negeri

.1 Amanat Menteri Dalam Negeri

115 Kementrian lainnya

116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)

117 Lembaga Non Kementrian

118 Otonomi Daerah

119 Kerjasama antar Kementrian

120 PEMERINTAH PROVINSI

.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi

.2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)

.3 Monografi, tambahkan kode wilayah

.1 Koordinasi

.11 Satuan Kerja Perangkat Daerah

.12 Instansi Vertikal

.13 Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri

121 Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

122 Wakil Gubernur, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dsb

123 Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan

124 Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida

125 Pembentukan / Pemekaran

.1 Pembentukan Daerah Otonom

.2 Pembentukan Wilayah

.3 Perubahan Batas Wilayah

.4 Pemekaran Wilayah

.5 Permasalahan Batas Wilayah

.6 Pemindahan Ibukota Provinsi

.7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan

126 Pembagian Wilayah

127 Penyerahan Urusan

128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah

130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

.0 .1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota

.0 .2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)

.0 .3 Monografi

.0 .4 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

.1 Koordinasi

.1 .1 Satuan Kerja Perangkat Daerah

.1 .2 Instansi Vertikal

.1 .3 Kerjasama antar Provinsi / Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)

131 Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhantian, serah terima jabatan dan sebagainya

132 Wakil Bupati/Walikota, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, dan sebagainya

133 Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan

134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, Meliputi Muspida

.1 Musppida
.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
.3 Forum Koordinasin Lainnya
.4 Kerjasama Antar Kabupaten/Kota

135 Pembentukan Daerah
.1 Pembentukan Daerah Otonom
.2 Pembentukan Wilayah
.3 Perubahan Batas Wilayah
.4 Pemekaran Wilayah
.5 Permasalahan Batas Wilayah
.6 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
.7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, Jalan

136 Pembagian Wilayah

137 Penyerahan Urusan

138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
.1 Pembentukan Kecamatan
.2 Pemekaran Kecamatan
.3 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
.4 Pemindahan Ibu kota Kecamatan
.5 Laporan Kecamatan
.6 Sambutan/Pengarahan/Amanat
.7 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren

140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

141 Pamong Desa, Meliputi Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb

.1 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kepala Desa
.2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa

142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan (APBDes /Kel)

143 Kekayaan Desa : Bondo desa, tanah bengkok dll

144 Lembaga Tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD

145 Administrasi Desa/Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll

146 Kewilayahan
.1 Pembentukan Desa/Kelurahan
.2 Pemekaran Desa/Kelurahan
.3 Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan
.4 Perubahan Nama Desa/ Kelurahan
.5 Permasalahan Batas Desa/Kelurahan
.6 Penyatuan Desa/Kelurahan
.7 Penghapusan Desa/ Kelurahan
8 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan

147 RT-RW

148 Perangkat Kelurahan
.1 Lurah
.2 Sekretaris Kelurahan
.3 Staff Kelurahan

149 Dewan Kelurahan

150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
151 Keanggotaan MPR
.1 Pencalonan
.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
.3 Pemberhentian
.1 Recall
.2 Meninggal
.4 Pelanggaran
.5 Penggantian Antarwaktu
152 Keanggotaan DPR
.1 Pencalonan
.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
.3 Pemberhentian
.1 Recall
.2 Meninggal
.4 Pelanggaran
.5 Penggantian Antarwaktu
153 Keanggotaan DPD
.1 Pencalonan
.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
154 Persidangan
155 Kesejahteraan
.1 Keuangan
.2 Penghargaan
156 Hak
157 Jawaban Pemerintah
158 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
159 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi

160 DPRD PROVINSI
161 Keanggotaan
.1 Pencalonan
.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
.3 Pelanggaran
.4 Pemberhentian Antar waktu
.1 Meninggal Dunia
.2 Mengundurkan Diri
.3 Diberhentikan
.5 Alat Kelengkapan Dewan
.1 Pimpinan
.2 Badan Musyawarah
.3 Komisi
.4 Badan Legislasi Daerah
.5 Badan Anggaran
.6 Badan Kehormatan
.7 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
162 Persidangan
.1 Rapat-rapat
.1 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
.2 Rapat Pimpinan DPRD
.3 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi,Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus

.4 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
.5 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
.6 Rapat Fraksi
.2 Fraksi
.3 Tata tertib
.4 Kode etik
.5 Reses
.6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
.7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
163 Kesejahteraan
.1 Keuangan
.2 Penghargaan
164 Hak
165 Sekretaris DPR Provinsi

170 DPRD KABUPATEN/KOTA
171 Keanggotaan
.1 Pencalonan
.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
.3 Pelanggaran
.4 Pemberhentian Antar waktu
.1 Meninggal Dunia
.2 Mengundurkan Diri
.3 Diberhentikan
.5 Alat Kelengkapan Dewan
.1 Pimpinan
.2 Badan Musyawarah
.3 Komisi
.4 Badan Legislasi Daerah
.5 Badan Anggaran
.6 Badan Kehormatan
.7 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
172 Persidangan
.1 Rapat-rapat
.1 .1 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
.2 Rapat Pimpinan DPRD
.3 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi,Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
.4 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
.5 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
.6 Rapat Fraksi
.2 Fraksi
.3 Tata tertib
.4 Kode etik
.5 Reses
.6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
.7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
173 Kesejahteraan
.1 Keuangan
.2 Penghargaan

174 Hak
175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota

180 HUKUM
.1 Konstitusi
.1 Dasar Negara
.2 Undang Undang Dasar
.3 Undang Undang
.4 Perauran Pemerintah
.5 Keppres/Perpres/Inpres
.6 Kepmen/Permen/Inmen
.7 Perundangan Tingkat Provinsi meliputi, Perda, Kepgub / Pergub / Ingub
.8 Perundangan Tingkat Kabupaten, Meliputi Perda, KepBup / KepWal / PerBup / PerWal
.9 Perundangan Tingkat Desa Meliputi, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
.2 Tap MPR
.3 Konvensi
181 Perdata
.1 Tanah
.2 Rumah
.3 Utang/Piutang
.1 Gadai
.2 Hipotik
.4 Notariat
182 Pidana
.1 Tindak Pidana Hukum
.2 Tindak Pidana Khusus
.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
183 Peradilan
.1 Jenis-Jenis Peradilan
.1 Peradilan Umum
.1 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
.2 Peradilan Tinggi
.3 Mahkamah Agung
.2 Peradilan Agama Islam
.1 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
.2 Peradilan Tinggi Agama Islam
.3 Makhamah Islam Agung
.3 Peradilan Militer
.1 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
.2 Makhamah Militer Tinggi
.3 Makhamah Militer Agung
.4 Peradilan Tata Usaha Negara
.1 Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama
.2 Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
.3 Makhamah Tata Usaha Negara Agung
.5 Peradilan Tindak Pidana Korupsi
.6 Peradilan Hak Asasi Manusia
.7 Mahkamah Konstitusi
.8 Komisi Yudisial
.9 Ombustmen

.2 Upaya Hukum
.1 Banding
.2 Kasasi
.3 Derden Verset
.4 Peninjauan Pembeli
.5 Grasi, amnesti,abolisi
.3 Eksekusi
.4 Pembinaan Hukum, meliputi kadarkum
.5 Bantuan Hukum, meliputi LBH
184 Hukum Internasonal
185 Imigrasi
.1 Visa
.2 Paspor
.3 Exit
.4 Reentry
.5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
186 Kepenjaraan
.1 Registrasi Narapidana
.2 Pembinaan Narapidana
.3 Pembebasan Narapidana
.4 Tahanan Titipan
187 Kejaksaan
.1 Penuntutan Umum
.2 Penuntutan Khusus
188 Hukum Adat
.1 Tokoh Adat/Masyarakat
189 Peraturan Perundang-undangan
.1 MPR
.2 Undang-undang
.3 Peraturan TAP
.1 Peraturan Pemerintah
.2 Peraturan Menteri
.3 Peraturan Lembaga Non Departemen
.4 Peraturan Daerah
.1 Peraturan Provinsi
.2 Peraturan Kabupaten/Kota
.4 Keputusan
.1 Presiden
.2 Menteri
.3 Lembaga Non Departemen
4 Gubernur
.5 Bupati/Walikota
.5 Instruksi
.1 Presiden
.2 Menteri
.3 Lembaga Non Departemen
.6 Standar Operasional Prosedur

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
191 Perwakilan Asing
192 Tamu Negara
193 Kerjasama Diplomatik Dengan Negara Asing

.1 ASEAN
.2 Bantuan Luar Negeri/Hibah
194 Perwakilan RI Diluar Negri
195 PBB
196 Laporan Luar Negeri

200 POLITIK
201 Perencanaan Dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
.1 Pembinaan Dan Pemahaman Ideologi Negara
.2 Kesatuan Bangsa
.3 Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Termasuk Laporannya
.4 Keadaan Politik Luar Negeri
.5 Evaluasi Dan Pegawasan Pembinaan Ipoleksosbut hankam
.6 Orde Baru
.7 Orde Reformasi
202 Kebijaksanaan Umum

210 KEPARTAIAN
211 Partai politik
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
.2 Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
.3 Pembinaan PARPOL
.4 Hasil Munas/Musda PARPOL
.5 Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
.6 Data Inventaris Dan Keuangan PARPOL
212 Partai/Organisasi Terlarang
.1 Keputusan Pembubaran Partai/Organisai Terlarang
.2 Daftar Dan Data Pengurus Anggota Partai/Organisai Terlarang
.3 Ijin Meninggalkan Tempat/Domisili Bagi Anggota Partai/Organisasi
.4 Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi Terlarang
.5 Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisai Terlarang

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
222 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
223 Berdasarkan Perjuangan
.1 Perintis Kemerdekaan
.2 Angakatan 45
.3 Veteran
224 Berdasarkan Kekayaan
.1 PEPABRI
.2 Wredatama

225 Berdasarkan Kerohanian
226 Lembaga Adat

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
232 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
233 Ikatan Dokter Indonesia
234 Persatuan Guru Republik Indinesia
235 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
.1 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
236 Persatuan Advokat Indonesia
237 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
238 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
.1 Persatuan Advokat Indonesia
.2 Korps Pegawai Republik Indonesia
239 Jabatan Fungsional Lain
.1 Arsiparis
.2 Pustakawan

240 ORGANISASI PEMUDA
241 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
242 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
243 Komite Nasional Pemuda Indonesia
244 Organisasi Mahasiswa
245 Organisasi Pelajar
246 Gerakan Pewmuda Ansor
247 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
248 Gerakan Pemuda Marhaenis

250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
252 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi

253 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
254 Organisasi Buruh Internasional
255 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
256 Keluarga Supir Proporsional Seluruh Indonesia (SPSI)
257 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

260 ORGANISASI WANITA
261 Pembentukan Organisasi
.1 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
.3 Program Kerja Organisasi
.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
262 Pembinaan Organisasi
.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
263 Dharma Wanita
264 Persatuan Wanita Indonesia
265 Pemberdayaan Perempuan (wanita)
266 Kongres Wanita

270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM) PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
271 Pencalonan
272 Nomor Urut/Tanda Gambar
273 Kampanye
.1 Dana Kampanye
274 Petugas Pemilu
275 Pemilih/Daftar Pemilih
276 Sarana
.1 TPS
.2 Kendaraan
.3 Surat Suara
.4 Kotak Suara
277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara
278 Hasil Pemilu
.1 Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
.2 Penetapan pemenang pilkada
.3 Pengambilan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD
279 KPU/KPUD

280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA
281 Pemantauan
282 Pelanggaran
283 Sengketa
284 Panwaslu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
.1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
.2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
.3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman
.4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
301 Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)

302 Pengawasan Trantibum
303 Penegakan Pelaksanaan Perda
304 Pembinaan / Penyuluhan pelanggaran Perda
305 Patroli Wilayah
306 Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
.1 Pengamanan
.2 Pengawalan
307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan , ketentuan pelaksanaan dan pengawasan

310 PERTAHANAN
311 Darat
312 Laut
313 Udara
314 Ketahanan Bangsa
315 Katahanan Ekonomi
316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

320 KEMILITERAN/TNI
321 Latihan Militer
322 Wajib Militer
323 Operasi Militer
324 Kekaryaan TNI
.1 AMD
325 Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

330 KEAMANAN
331 Kepolisian
.1 Polisi Pamong Praja
332 Huru-Hara/Demonstrasi
333 Senjata Api/Tajam
334 Bahan Peledak
335 Perjudian
336 Surat-surat Kaleng
337 Pengaduan Masyarakat
338 Himbauan atau Larangan

340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
.1 Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341 Pembinaan dan Diklat
.1 Pengangkatan / Pemberhentian anggota Linmas
.2 Pendidikan/latihan Linmas
.3 Pelatihan PAM Swakarsa
.4 Pendidikan/Latihan MENWA
342 Pengerahan dan pengendalian Linmas
343 Kesejahteraan bagi anggota Linmas
.1 Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
.2 Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
.3 Santunan uang duka bagi anggota Linmas
.4 Penghargaan bagi anggota Linmas
344 Data Linmas, MENWA, PAM Swankarsa
.1 Linmas Lanjut Usia
345 Orientasi Kesadaran Bela Negara

346 Kegiatan Pelaksanaan Linmas

350 KEJAHATAN
351 Makar/Pemberontakan/Terorisme
352 Pembunuhan
353 Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
354 Subversi/penyelundupan/Narkotika
355 Penipuan dan Pemalsuan
356 Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
357 Kekerasan pada perempuan dan anak
.1 Pelaporan
.2 Penanganan Korban
358 Kenakalan
359 Kejahatan lainnya (traficking, hipnotis, dll)

360 BENCANA
.1 Pelatihan
.2 Surat Keputusan
.3 Berita Acara
361 Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362 Banjir/Tanah Longsor
363 Angin Topan
364 Kebakaran
.1 Pemadaman Kebakaran
365 Kekeringan
366 Posko Bencana
367 Koordinasi / Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368 MOU Pemerintah Pusat BNPB

370 KECELAKAAN
371 Latihan SAR
372 Latihan Ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373 Pelatihan managemen bagi pejabat
374 Satkorlak dan Satlak PBP
375 Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
376 Latihan Ketrampilan pemadam kebakaran
377 Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378 Investigasi/ Penyelidikan Kecelakaan
379 Asuransi kecelakaan

380 PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381 Perencanaan
.1 Perencanaan Teknis
.2 Rekomendasi
382 Bantuan Bencana
383 Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384 Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385 PUSDALOPS
386 Kunjungan lapangan
387 Relawan
388 Laporan Bencana

390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

391 Instansi pemerintah Pusat
392 Instansi pemerintah di daerah
393 Lembaga International
394 Lembaga non pemerintah nasional

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
401 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
402 Keluarga Miskin

410 PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN
411 Gotong-royong
.1 Swadaya gotong royong
.1 Pembinaan
.2 Pungutan
.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
.3 Latihan kerja masyarakat
.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
.5 Penyuluhan Masyarakat Desa
.6 Kelembagaan Desa
.7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412 Perekonomian Desa
.1 Produksi Desa
.1 Pengolahan
.2 Pemasaran
.2 Pembiayaan Pembangunan Desa
.1 Inventarisasi Data
.2 Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan
.3 Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
.4 Bantuan/ Stimulasi/ADD
.5 Perkreditan Desa
.6 Pelaporan
.7 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
.3 Koperasi Desa
.1 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
.2 Koperasi Unit Desa (KUD)
.4 Keuangan
.1 Perkreditan Desa
.2 Inventarisasi Data
3 Perkembangan/Pelaksanaan
.4 Bantuan/Stimulans
.5 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
.5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
.1 Pusat
.2 Daerah
.6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
.1 Bantuan Langsung
.2 Bantuan Keserasian
3 Bantuan Juara Lomba Desa
413 Sarana dan Prasarana Desa
.1 Prasarana Desa
.1 Pembinaan
.2 Bimbingan Teknis

.2 Pemukiman kembali penduduk
.1 Lokasi
.2 Diskusi
.3 Pelaksanaan
.3 Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
.1 Rumah Sehat
.2 Proyek Perintis
.3 Pelaksanaan
.4 Pengembangan
.5 Perbaikan Kampung
.4 Perbaikan Kampung
.5 Teknologi Tepat Guna (TTG)
.6 Masyrakat Pradesa
.1 Pembinaan
.2 Penyuluhan

414 Pengembangan Desa
.1 Tingkat Perkembangan Desa
.1 Jumlah Desa
.2 Pemekaran Desa
.3 Pembentukan Desa Baru
.4 Evaluasi
.5 Bagan
.2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
.1 Penyuluhan Program
.2 Lokasi UDKP
.3 Pelaksanaan
.4 Bimbingan/Pembinaan
.5 Evaluasi
.3 Tata Desa
.1 Inventarisasi
.2 Penyusunan Pola Tata Desa
.3 Aplikasai Tata Desa
.4 Pemetaan
.5 Pedoman Pelaksanaan
.6 Evaluasi
.4 Perlombaan Desa dan Kelurahan
.1 Pedoman
.2 Penilaian
.3 Kejuaraan
.4 Piagam
.5 Pemukiman Kembali Penduduk
.1 Lokasi
.2 Diskusi
.3 Pelaksanaan
.6 Masyarakat Pradesa
.1 Pembinaan
.2 Penyuluhan
.7 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
.1 Rumah Sehat
.2 Proyek Perintis
.3 Pelaksanaan
.4 Pengembangan

.5 Perbaikan Kampung

415 Koordinasi
- .1 Sektor Khusus
- .2 Rapat Koordinasi
- .3 Tim Koordinasi Pusat
- .4 Kerjasama
  - .1 Luar Negeri
  - .2 Perguruan Tinggi
  - .3 Kementrian / Lembaga Pemerintah
  - .4 Lembaga Lainnya

420 PENDIDIKAN
- .1 Pendidikan Khusus
- .2 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan
- .3 Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
- .4 Pendidikan Kemasyarakatan

421 Sekolah (termasuk akreditasi)
- .1 Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
- .2 Sekolah Dasar
- .3 Sekolah Menengah
- .4 Sekolah Kejuruan
- .5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
- .6 Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
- .7 Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata,widyawisata, lomba-lomba (LKS, Olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan Pertukaran pelajar
- .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- .9 Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf

422 Administrasi Sekolah
- .1 Persyaratan masuk sekolah, testing ujian, OSPEK
- .2 Tahun Pelajaran
- .3 Hari Libur
- .4 Uang sekolah, diantaranya SPP, SPI
- .5 Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
- .6 Ijazah, Sertifikat
- .7 Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)

423 Metode Belajar
- .1 Kuliah
- .2 Ceramah, Simposium, Seminar
- .3 Diskusi
- .4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang / Praktek/ PKL
- .5 Kurikulum
- .6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
- .7 Ujian

424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru / dosen teladan, Guru/dosen berprestasi)
- .1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri
- .2 Sertifikasi Guru

425 Sarana Pendidikan
- .1 Bangunan Pendidikan
  - .1 Gedung Sekolah

.2 Kampus
.3 Pusat Kegiatan
.4 Perpustakaan
.5 Laboratorium
.2 Buku
.3 Perlengkapan Pendidikan
.4 Sistem Informasi pendidikan
.5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
426 Keolahragaan
.1 Pembina Keolahragaan
.1 Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
.2 Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
.3 Olah Raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional)
.4 Iptek dan Industri Olah Raga
.5 Sarana Prasarana Keolahragaan
.2 Pesta Olahraga
.3 Kemitraan Olah Raga
.4 KONI
427 Kepemudaan
.1 Pertukaran Pemuda
.2 Paskibraka
.3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
.4 Kemitraan Pemuda
.5 Karang Taruna
428 Kepramukaan/ Kepanduan
429 Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri

430 KEBUDAYAAN
.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan
.2 Pembinaan bidang kebudayaan
431 Kesenian
.1 Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll
.2 Sarana
.1 Gedung Kesenian
.2 Padepokan
.3 Lembaga Adat
.4 Kegiatan adat/ tradisi
432 Kepurbakalan
.1 Museum
.2 Peninggalan kuno
.1 Candi, termasuk pemugaran
.2 Benda
433 Sejarah
434 Bahasa
435 Usaha Pertunjukan, hiburan, kesenangan
436 Penghayat Kepercayaan

440 KESEHATAN
.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan
441 Pembinaan Kesehatan

.1 Gigi
.2 Mata
.3 Jiwa
.4 Kanker
.5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
.6 Perawatan
.7 Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
.8 Kesehatan Ibu dan Anak
.9 JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
.1 JAMKESMAS
.2 JAMKESDA
3 JAMPERSAL
.4 Jaminan lainnya
.10 Pekan Imunisasi Nasional

442 Obat-obatan
.1 Pengadaan
.2 Pemeriksaan Obat
.3 Penyimpanan Obat
.4 Distribusi Obat
.5 Pengawasan Obat
.1 Obat Generik
.2 Obat Terlarang
.3 Pemalsuan Obat

443 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
.1 Pencegahan Penyakit
.2 Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
.1 Kusta
.2 Kelamin, HIV, AIDS, IMS
.3 Frambusia
.4 T.B.C
.5 Kholera
.6 SARS, dan Jenis penyakit lainnya
.3 Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
.1 Malaria
.2 Dengue Haemorraghuie Fever (DHF), DBD
.3 Filaria
.4 Serangga
.5 Rabies
.6 Antrak
.7 Leptosirosis
.8 Chikungunya
.9 Penyakit Lainnya
.4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
.1 A. Pektoris
.2 IMA (Irama Mastcmik Akut)
.3 Hipertensi
.4 Stroke
.5 Diabetes Melitus
.6 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Serviks
.7 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Mammae
.8 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Hepar

Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit C.A Paru, dan penyakit lainnya

.5 Epidemiology dan Karantina (Epidka)

.1 Imunisasi

.2 Surveilanse

.3 Pestisida

.4 Pencemaran Udara

.5 Jamban Keluarga

.6 Kesehatan Institusi

.6 Higiene sanitasi

.1 Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga

.2 Sarana air minum

.3 Pestisida, insektisida

.4 Pencemaran

.5 Jamban Keluarga, sanitasi rumah tangga

.6 Kesehatan Institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll

.7 Higiene sanitasi C.A Mammae

.8 Higiene sanitasi C.A Hepar

.9 Higiene sanitasi C.A Paru

.7 Kejadian Khusus

.1 Dekopensatiokordosis (serangan jantung)

.2 Asma

.3 Psikosis

.4 PPOM

.5 Kecelakaan Lalu Lintas

.6 Kejadian Luar Biasa (KLB)

444 Gizi dan Pengawasan Makanan

.1 Kekurangan makanan

.2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk

.3 Keracunan Makanan

.4 Menu Makanan Rakyat

.5 Gondok endemik (GAKI)

445 RSU, RSJ, RS Khusus

.1 Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)

.1 Rawat Inap

.2 Rawat Jalan

.3 IGD

.4 IBS

.5 ICU

.6 MCU (Medical Check Up)

.2 Penunjang Medis

.1 Farmasi

.2 Rekam Medik

.3 Radiologi

.4 Gizi

.5 Laboratorium Klinik

.6 Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik

9 CSSD/ Laundry

3 Keperawatan

.4 Komite Medik

.5 SPI (Satuan Pengawas Internal)
.6 Mutu Rumah Sakit
.1 Akreditasi
.2 ISO
.3 PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
.4 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
.7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
.8 Promosi layanan Kesehatan
.9 Kasus Hukum Rumah Sakit

446 Tenaga Medis
.1 Perencanaan Tenaga Medis
.2 Pendayagunaan Tenaga Medis
.1 Perijinan untuk Tenaga Medis
.2 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
.3 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
.3 Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis
.4 Diklat Tenaga Kesehatan/ Para Medis
.5 Pendidikan di bidang kesehatan termasuk pendidikan spesialis

447 Peralatan Kesehatan
.1 Standarisasi
.2 Penyimpanan
.3 Distribusi
.4 Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan

448 Pengobatan Alternatif
.1 Pijat
.2 Akupuntur
.3 Jamu dan Herbal
.4 Dukun

449 Lembaga penyedia layanan kesehatan
.1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
.3 Rumah Bersalin
.4 Posyandu
.5 Laboratorium Kesehatan
.6 Apotik
.7 Sanatorium Kesehatan

450 AGAMA
.1 Kebijakan dan program pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
.2 Bantuan dibidang keagamaan

451 Islam
.1 Peribadatan
1 Sholat
.2 Zakat, Infaq, shodaqoh
.3 Puasa
.4 Umroh dan Haji
.5 MTQ
.2 Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
.3 Tokoh Agama
.4 Pendidikan Agama
.1 Pendidikan Tinggi Agama

.2 Menengah, MTs, MA
.3 Dasar, Pra Sekolah, MI
4 Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
.5 Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll
.6 Tenaga Pengajar
.7 Dakwah (Pengajian, MPQ)
.5 Wakaf
.6 Mazhab Agama Islam
.7 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hijab Rukyat dll)
.8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
.9 Peradilan

452 Kristen Protestan
.1 Peribadatan
.2 Rumah Ibadah Gereja dll
.3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
.4 Mazhab Agama Kristen Protestan
.5 Organisasi Gerejani

453 Khatolik
.1 Peribadatan
.2 Rumah Ibadah Gereja dll
.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
.4 Mazhab Agama Khatolik
.5 Organisasi Gerejani

454 Hindu
.1 Peribadatan
.2 Rumah Ibadah Pura dll
.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
.4 Mazhab Agama Hindu
.5 Organisasi Agama Hindu

455 Budha
.1 Peribadatan
.2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll)
3 Tokoh Agama, Rohaniawan
.4 Mazhab Agama Budha
.5 Organisasi Agama Budha

456 Urusan Haji
.1 ONH
.2 Manasik

457 Kong Hu Cu
.1 Peribadatan
.2 Rumah Ibadah Klenteng dll
.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
.4 Mazhab Agama Kong Hu Cu
.5 Organisasi Agama Kong Hu Cu

460 SOSIAL

461 Rehabilitasi Penyandang Cacat
.1 Cacat Ganda
.2 Cacat Fisik
.3 Cacat Mental

.4 Cacat Mata
.5 Bisu/Tuli

462 Rehabilitasi Sosial
.1 Gelandangan/ Orang Terlantar, anak jalanan
.2 Pengemis
.3 Tuna Susila
.4 Anak Nakal
.5 Tuna Wisma

463 Kesejahteraan anak dan keluarga
.1 Kesejahteraan anak
.1 Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
.2 Perlindungan Anak
.3 Anak Asuh
.2 Kualitas Hidup Perempuan
.1 Perlindungan Perempuan
.2 Ibu Teladan
.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)
.3 Anak Putus Sekolah

464 Keperintisan dan Kepahlawanan
.1 Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
.2 Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan
.3 Cacat Veteran

465 Kesejahteraan Sosial
.1 Lanjut Usia
2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
.3 Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll

466 Sumbangan Sosial
.1 Korban Bencana
.1 .1 Jaminan Sosial
.2 Pencarian dana untuk sumbangan : penyelanggaraan undian, ketangkasan, bazar dll
.3 Panti Asuhan
.4 Panti Jompo

467 Bimbingan Sosial
.1 Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya

468 PMI

469 Makam
.1 Umum
.2 Pahlawan
.3 Khusus, Keluarga, Raja
.4 Krematorium

470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan

471 Pendaftaran Penduduk
.1 Identitas Penduduk
.1 Biodata
.2 Nomor Induk Kependudukan

.3 Kartu Tanda Penduduk
4 Kartu Keluarga
5 Advokasi Identitas Penduduk
.2 Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia
.1 Perpindahan penduduk WNI
.2 Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
.3 Perpindahan penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
.4 Daerah terbelakang
.5 Bedol Desa
.3 Perpindahan penduduk antar Negara
.1 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
.2 Orang asing tinggal sementara
.3 Orang asing tinggal tetap
.4 Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
.4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
.1 Akibat bencana alam
.2 Akibat kerusuhan sosial
.3 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
.4 Pendaftaran penduduk rentan
472 Pencatatan Sipil
.1 Kelahiran kematian dan advokasi
.1 Kelahiran
.2 Kematian
.3 Advokasi
.2 Perkawinan, perceraian dan advokasi
.1 Perkawinan agama Islam
.2 Perkawinan agama non Islam
.3 Perceraian agama Islam
4 Perceraian agama non Islam
.5 Advokasi
.3 Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
.1 Pengangkatan anak
.2 Pengakuan anak
.3 Pengesahan anak
.4 Perubahan akta
.5 Pembatalan akta
6 Advokasi
.4 Pencatatan Kewarganegaraan
.1 Akibat perkawinan
.2 Akibat kelahiran
.3 Non Perkawinan/ Non Kelahiran
.4 Naturalisasi
.5 Perubahan WNI ke WNA
473 Informasi Kependudukan
.1 Teknologi Informasi
.1 Perangkat Keras
.2 Perangkat Lunak
.3 Jaringan Komunikasi Data
.2 Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi
.1 Daerah Maju

.2 Daerah Berkembang
.3 Daerah Terbelakang
.3 Pengolahan Data Kependudukan
.1 Pendaftaran penduduk
.2 Kejadian vital penduduk
.3 Penduduk non registrasi
.4 Pelayanan informasi kependudukan
.1 Media Elektronik
.2 Media Cetak
.3 Outlet
474 Perkembangan Penduduk
.1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
.1 Struktur Jumlah
.2 Komposisi
.3 Fertilitas
.4 Kesehatan Reproduksi
.5 Morbiditas Penduduk
.6 Mortalitas Penduduk
.2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
.1 Anak dan Remaja
.2 Penduduk Usia Produktif
.3 Penduduk Lanjut Usia
.4 Gender
.3 Penataan Persebaran Penduduk
.1 Migrasi antar wilayah
.2 Urbanisasi
.3 Migrasi Internasional
.4 Sementara
.5 Migrasi Non Permanen
.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
.1 Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
.2 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
.3 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
.4 Partisipasi Masyarakat
.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
.1 Pendidikan Jalur Sekolah
.2 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
.3 Pendidikan Jalur Masyarakat
.4 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475 Transmigrasi
.1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
.1 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
.2 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
.3 Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrasi
.4 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
.5 Publikasi transmigrasi melalui pemeran dan kesenian
.6 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
.7 Kerjasama di bidang transmigrasi
.8 Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik

.2 Pemukiman Transmigrasi

.1 Penggunaan Tanah Pemukiman Transmigrasi

.2 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi

.3 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi

.4 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman

.5 Standarisasi dan spesifikasi rumah transmigran, fasilitas umum / sosial dan jaringan transportasi

.6 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya , identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah

.7 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi

.8 Tata ruang pemukiman transmigrasi

.1 Rancangan dan Pemanfaatan areal tanah

.2 Rancangan Kapling TSM

.3 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum

.4 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah

.5 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah

.6 Pengukuran batas unit pemukiman

.7 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah

.9 Sarana Pemukiman Transmigrasi

.1 Pembinaan dan Pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum

.2 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih

.3 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi

.4 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana

.5 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan

.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan

.1 Pengkajian dan pengembangan metode pengarahan dan penempatan

.2 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengarahan dan penempatan

.3 Pengerahan

.1 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran

.2 Berkas Persyaratan dan administrasi calon Transmigran

.3 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan

.4 Pemberangkatan Transmigran

.1 Pengangkutan Transmigran melalui laut, udara, dan darat

.2 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan

.3 Pelaksanaan Pengurusan Pemberangkatan

.4 Pengawalan Perjalanan Transmigran

.5 Pengaturan Rute Pemberangkatan

.6 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan

.5 Penempatan Transmigran

.1 Kesiapan lokasi dan daya tampung

.2 Pendapatan Transmigran di lokasi yang masih dibina
.3 Data Transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
.4 Pemantauan penempatan Transmigrasi pengganti

.4 Penampungan Transmigrasi (Transito), dan Pelatihan transmigran

.1 Pelatihan Transmigran
.1 Program Pengajaran dan metode pelatihan
.2 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
.3 Penyusunan calon peserta / pelatih
.2 Penampungan Transmigran di transito
.1 Pelayanan kesehatan bagi Transmigran
.2 Pelayanan makanan bagi Transmigran
.3 Pelayanan pembekalan/ peralatan bagi Transmigran

.5 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
.1 Identifikasi dan penjajagan pembinaan
.1 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
.2 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
.3 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
.2 Pembinaan Pendidikan
.1 Penyediaan/ penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
.2 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
.3 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
.4 Pembinaan Kesehatan
.1 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
.2 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
.3 Pendistribusian bantuan Pangan
.5 Pembinaan rokhani
.1 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
.2 Bimbingan adaptasi masyarakat
.3 Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
.6 Pelayanan pos di daerah Transmigrasi
.7 Pennyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
.8 Penilaian Transmigran Teladan
.9 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha

476 Keluarga Berencana
.1 Alat Kontrasepsi
.2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
.3 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
.4 Pos KB Desa
.5 Akseptor KB

477 Proyeksi dan Penyerasian Kebuijakan. Kependudukan
.1 Indikator Kependudukan
.1 Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
.2 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
.3 Sosialisasi Indikator Kependudukan
.2 Proyeksi Penduduk
.1 Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan

.2 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
.3 Analisis Dampak Kependudukan
.1 Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan
.2 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
.4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
.1 Lembaga Internasional
.2 Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
.3 Lembaga Usaha Swasta
.5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
.1 Lembaga Pemerintah
.2 Pemerintah Provinsi dan Kota
.3 Pemerintah Kabupaten
476 Monitoring
477 Evaluasi
478 Dokumentasi

480 MEDIA MASSA
.1 Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa
481 Media Cetak meliputi perijinan hinggan pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
.1 Surat Kabar
.2 Majalah
.3 Buletin
.4 Jurnal
.5 Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
.1 Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
.2 Perekonomian dan Perbankan
.3 Bidang Lainnya
.6 Layanan Informasi / Leaflet
.7 Masukan Analisis Gubernur
482 Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
.1 Radio
.2 Televisi
.3 Film Dokumenter
.4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
.5 Kelompok pemantau Isi Siaran
.6 Pengkajian Isi Siaran
.7 SDM Penyiaran
483 Periklanan
.1 Ketentuan Pemasangan Reklame
.2 Pameran
484 Kewartawanan / Jurnalistik
.1 Pembentukan Organisasi Profesi
.2 Kasus-kasus Kewartawanan
.3 Penyalahgunaan Profesi
.4 Bantuan kepada / dari organisasi Profesi Wartawan
.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
.6 Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
.7 Temu Pers/Konferensi Pers
.8 Pers Tour
.9 Kunjungan Wartawan Asing

485 Penyuluhan Masyarakat
.1 Publikasi
.2 Pendirian Information Center
486 Pembinaan Bidang Infokom
.1 Training Photografi
.2 Training Berita Jurnalistik
.3 Bintek Infokom
.4 Rakorda Infokom
.5 Rakor Pengendalian Kegiatan
.6 Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
487 Hubungan Antar Lembaga
.1 Non Pemerintah
.1 Wahana Komunikasi Masyarakat
.2 Lembaga Komunikasi Masyarakat
.2 Lembaga Pemerintah
.1 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
.2 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
.3 Luar Negeri
.1 Promosi Luar Negeri
.2 Kunjungan Wartawan Asing
488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
.1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
.2 Dialog Interaktif
.3 Rubrik
.4 Materi/pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
.5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-hasil Pembangunan
490 Grafika
491 Penerangan
.1 Pameran Non Komersil
492 Operation Room
493 Hubungan Masyarakat

500 PEREKONOMIAN
.1 Dewan Stabilisasi
501 Pengadaan Pangan
502 Pengadaan Sandang
503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya

510 PERDAGANGAN
.1 Promosi perdagangan
.1 Pekan raya
.2 Iklan
.3 Pameran
.4 Event-event
.5 Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
.2 Pelelangan, distribusi
.1 Pemasaran Sembako

.2 Pemasaran hasil industri
.3 Penentuan harga pokok

.3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
.1 Rencana dan Program kerja
.2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
.3 Pelaksanaan Teknis
.4 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
.5 Evaluasi dan Pelaporan

.4 Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
.1 Penerbitan SIUP
.2 Perpanjangan
.3 Ijin prinsip
.4 Rekomendasi

.5 Perdagangan antar Pulau
.1 Kerjasama bahan baku
.2 Industri pemasaran
.3 Kontrak

.6 T e r a
.1 Tera dan Tera Ulang
.2 Takaran
.3 Timbangan dan anak timbangan
.4 Kalibrasi
.5 Cap tanda tera
.6 Biaya tera

.7 Bantuan peralatan
.1 Proposal
.2 Surat perjanjian/kontrak
.3 Serah terima

.8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik

.9 Kemetrologian
.1 Standart Tingkat Tiga
.2 Standart Kerja Satuan Ukuran
.3 Ukuran Metrologi
.1 Peralatan
.2 Laboratorium Metrologi Legal
.3 Tanki Ukur Mobil
.4 Meter Taxi
.5 KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
.6 S P B U

511 Pemasaran
.1 Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
.2 P a s a r
.3 Pertokoan, kaki lima, kios
.4 Pusat perbelanjaan

512 Ekspor
.1 Ekspor Hasil Industri
.2 Ijin Ekspor
.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
.4 Managemen Perdagangan Internasional
.5 Eksport Hasil Industri
.5 .1 Kebijakan

.5 .2 Pemasaran
.6 Pemberitahuan Eksport Barang
.7 Pengawasan Mutu Barang
.8 Eksportir Terdaftar
.9 Evaluasi dan pelaporan
513 Impor
.1 Ijin Impor
.1 .1 Pemberian Ijin
.1 .2 Pengendalian Ijin
.2 Standart Mata Dagang Import
.3 Management Perdagangan Internasional
.4 Kegiatan Import
..4 .1 Pembinaan Import
.4 .2 Pengendalian Import
.4 .3 Pemantauan Import
.5 Faktor-faktor Pendukung
.6 Pengawasan Mutu Barang Import
.7 Penyaluran Kegiatan Import
.7 .1 Bahan Konsumsi
.7 .2 Bahan Baku
.7 .3 Bahan Penolong
.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
514 Perdagangan antar Pulau
.1 Kerjasama Bahan Baku
.2 Industri Pemasaran
.3 Kontrak
515 Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
.1 Promosi dan Informasi
.2 Pameran
.3 Kerjasama
516 Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
.1 Peti Kemas
.2 Tangki Penyimpanan
517 Aneka Usaha Perdagangan
518 Koperasi (Untuk BUUD, KUD)
.1 Bina Usaha Koperasi
.1 .1 Koperasi Pertanian
.1 .2 Koperasi Non Pertanian
.1 .3 Permodalan Koperasi
1 .3 .1 Penumpukan Modal
.1 .3 .2 Pemanfaatan Modal
.1 .3 .3 Perbankan dan Asuransi
.1 .3 .4 Permodalan Luar Koperasi
.1 .3 .5 Kredit Program Umum
.1 .3 .6 Kredit Program Khusus
.1 .4 Distribusi dan Jasa Koperasi
.1 .4 .1 Distribusi Bahan Pokok
.1 .4 .2 Distribusi Aneka Bahan
.1 .4 .3 Distribusi Kerjasama Niaga
.1 .4 .4 Jasa Angkutan
.1 .4 .5 Jasa Perumahan
.1 .4 .6 Aneka Jasa

.1 .5 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
.2 Bina Lembaga Koperasi
.2 .1 Organisasi Koperasi
.2 .1 .1 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
.2 .1 .2. Pemberian Badan Hukum Koperasi
.2 .1 .3 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
.2 .1 .4 Keragaan Koperasi
.2 .1 .5 Pengakuan Koperasi Sekolah
.2 .1 .6 Amalgamasi
.2 .1 .7 Tertib Organisasi Koperasi
.2 .1 .8 Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan
.2 .1 .9 Bimbingan Kesadaran Hukum
.2 .2 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
.2 .2 .1 Rapat Anggota Tahunan Koperasi
.2 .2 .2 Pengurus dan Bahan Pemeriksa
.2 .2 .3 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
.2 .2 .4 Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
.2 .3 Bina Tata Laksana Koperasi
.2 .3 .1 Klasifikasi Koperasi Pedesaan
.2 .3 .2 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
.2 .3 .3 Klasifikasi Koperasi Sekunder
.2 .4 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
.2 .4 .1 Administrasi Koperasi Pedesaan
.2 .4 .2 Administrasi Koperasi Perkotaan
.2 .4 3 Karyawan/Manager Koperasi
.2 .4 4 Sumber Daya Manusia
.2 .4 5 Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
.2 .4 6 Penyaluran Alat Sekolah
.2 .4 7 Bantuan Pemda Kepada Koperasi/KUD
.2 .5 Akuntansi
.2 .5 .1 Akuntansi Koperasi Pedesaan
.2 .5 .2 Akuntansi Koperasi Perkotaan
.2 .5 .3 Akuntansi Koperasi Sekunder
.2 .6 Pengawasan Koperasi
.2 .6 .1 Pengawasan Koperasi Primer
.2 .6 .2 Pengawasan Koperasi Sekunder
.2 .6 .3 Koperasi Jasa Audit
.2 .6 .4 Kerjasama Kantor Akuntan
.2 .7 Penyuluhan Koperasi
.2 .7 .1 Pembinaan Kader Koperasi
.2 .7 .2 Masyarakat Umum
.2 .7 .3 Forum Komunikasi
.2 .7 4 Kelompok Tani
.2 .7 5 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
.2 .7 6 Penilaian Tingkat Nasional
.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
.3 .1 Pembinaan Usaha
.3 .1 .1 Pembinaan Usaha Mikro
.3 .1 .2 Pembinaan Usaha Kecil
.3 .1 .3 Pembinaan Usaha Menengah
.3 .2 Pengawasan Usaha

.3 .2 .1 Pengawasan Usaha Mikro
.3 .2 .2 Pengawasan Usaha Kecil
.3 .2 .3 Pengawasan Usaha Menengah

520 PERTANIAN
521 Tanaman Pangan
.1 Rencana dan Program
.1 .1 Bimas/Inmas Termasuk Kredit
.1 .2 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
.1 .3 Penyuluhan
.2 Produksi
.2 .1 Padi
.2 .2 Palawija
.2 .3 Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)
.2 .4 Panen Gagal (Puso)
.2 .5 Jagung
.2 .6 Ketela Pohon/Ubi-ubian
.2 .7 Pembudidayaan Rumput Laut
.3 Sarana Usaha Pertanian
.3 .1 Peralatan
.3 .2 Meliputi Traktor dan sebagainya
.3 .3 Pembenihan dan pembibitan
.3 .4 Pupuk
.3 .5 Irigasi Pertanian
.3 .6 Rehabilitasi Lahan Pertanian
.4 Perlindungan Tanaman
.4 .1 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
.4 .1 .1 Penyakit Tanaman Pangan
.4 .1 .2 Hama tanaman pangan
.4 .2 Pemberantas
.4 .2 .1 Pestisida
.4 .2 .2 Agensia Pengendalian Hayati
.4 .3 Tanah Pertanian Pangan
.4 .3 .1 Persawahan
.4 .3 .2 Perladangan
.4 .3 .3 Kebun
.4 .3 .4 Rumpon Ikan Laut
.5 Pengusaha, Petani
.6 Lahan Kritis
.7 Pemasaran dan Promosi Pertanian
.8 Pengembangan Sumber Daya Pertanian
.9 Bina Usaha
.1 Pasca Panen
.2 Pemasaran Hasil

522 Kehutanan
.1 Perencanaan Hutan
.1 .1 Survey
.1 .1 .1 Survey PPA
.1 .1 .2 Survey Areal
.1 .1 .3 Survey Pembinaan Hutan
.1 .1 .4 Survey Potensi Hutan

.1 .2 Pendataan / Inventarisasi Areal Hutan
.1 .2 .1 Data Areal Tata Guna Hutan
.1 .2 .2 Data areal konservasi
.2 Tata Guna hutan
.2 .1 Tata Ruang Kawasan
.2 .1 .1 Pengurusan Kawasan Hutan
.2 .1 .2 Penafsiran Hutan
.2 .1 .3 Mutasi Hutan
.2 .2 Tata Hutan
.2 .2 .1 Tata Hutan Sementara
.2 .2 .2 Tata Hutan Tetap
.2 .2 .3 Pembukaan Hutan
.2 .3 Pengukuran dan pemetaan
.3 Pengusahaan Hutan
.3 .1 Data Areal HPH
.3 .1 .1 SK HPH
.3 .1 .2 Kerja sama
.3 .1 .3 Pembatalan/Penolakan
.3 .2 Modal dan Peralatan
.3 .2 .1 Inventarisasi Loging
.3 .2 .2 Inventarisasi Industri
.3 .2 .3 Peralatan
.3 .2 .4 Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
.3 .2 .5 Pemegang Saham
.3 .2 .6 Neraca Perusahaan
.3 .3 Rencana Kerja
.3 .3 .1 KHPH
.3 .3 .2 RKPH
.3 .4 Perpanjangan LPH
.3 .5 Produksi
.3 .5 .1 Target Produksi
.3 .5 .2 Produksi Kayu
.3 .5 .3 Produksi Non Kayu
.3 .6 Industri
.3 .6 .1 Industri Kayu HPH
.3 .6 .2 Industri Kayu Non HPH
.3 .6 .3 Industri Non Kayu
.3 .7 Pembinaan HPH
.3 .7 .1 Pelanggaran dan Sanksi
.3 .8 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
.3 .8 .1 Hutan Tanaman Industri Pulp
.3 .8 .2 HTI Pertukaran
.3 .9 Iuran Hutan
.4 Sarana Usaha
.4 .1 Standarisasi
.4 .1 .1 Kayu
.4 .1 .2 Non Kayu
.4 .2 Pengujian Hasil Hutan
.4 .3 Pengembangan
.4 .3 .1 Pengembangan Perusahaan
.4 .3 .2 Pengembangan Pemasaran
.4 .4 Pemasaran Hasil Hutan

.4 .5 SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
.4 .5 .1 Sarana dan Prasarana
.4 .5 .2 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
.4 .6 Tata Usaha Hasil Hutan
.4 .7 PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
.5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
.5 .1 Konservasi Jenis
.5 .1 .1 Satwa yang dilindungi
.5 .1 .2 Satwa yang tidak dilindungi
.5 .1 .3 Lembaga Konservasi Satwa
.5 .1 .4 Lembaga Konservasi Tumbuhan
.5 .2 Kawasan Konservasi
.5 .2 .1 Cagar Alam (termasuk laut)
.5 .2 .2 Suaka Margasatwa
.5 .2 .3 Taman Wisata (termasuk laut)
.5 .2 .4 Taman Nasional
.5 .2 .5 Taman Hutan Raya/ Kebun Raya
.5 .2 .6 Taman Baru
.5 .2 .7 Hutan Lindung
.5 .3 Pengkajian Lingkungan
.5 .3 .1 Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan
.5 .3 .2 Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan
.5 .4 Bina Cinta Alam
.5 .4 .1 Kelompok Pecinta Alam
.5 .4 .2 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
.5 .4 .3 Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
.5 .4 .4 LSM Lingkungan
.5 .5 Pengamanan Hutan
.5 .5 .1 Jaga Wana
.5 .5 .2 PPNS
.5 .5 .3 Gangguan Keamanan Hutan
.5 .5 .4 Bencana Alam
.5 .5 .5 Kebakaran Hutan
.5 .5 .6 Sengketa Hutan
.5 .5 .7 Hama dan Penyakit
.5 .5 .8 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
.5 .5 .9 Alat dan Mesin Kehutanan
.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
.6 .1 Pembenihan
.6 .1 .1 Tegakan Benih
.6 .1 .2 Pengadaan Benih
.6 .1 .3 Pengujian dan Penyimpangan Benih
.6 .1 .4 Lalu Lintas Angkutan Benih
.6 .1 .5 Pembibitan
.6 .1 .6 Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
.6 .1 .7 Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
.6 .2 Tanaman Reboisasi
.6 .2 .1 Lahan Kritis
.6 .2 .2 Reboisasi Lahan HPH
.6 .2 .3 Rehabilitasi Tanah Hutan
.6 .2 .4 Konservasi Tanah dan Air

.6 .2 .5 Pengendalian Perladangan
.6 .2 .6 Penghijauan
.6 .2 .7 Aneka Usaha Kehutanan
.6 .3 Perhutanan Sosial
.6 .3 .1 Sutera Alam
.6 .3 .2 Minyak Kayu Putih
.6 .3 .3 Perlebahan
.7 Hutan Produksi
.7 .1 Hutan Produksi Terbatas
.7 .2 Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi
.8 Kawasan Lindung

523 Perikanan dan Kelautan
.1 Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
.1 .1 Penyuluhan
.1 .2 Teknologi
.2 Produksi Perikanan
.2 .1 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
.2 .2 Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
.2 .3 Sertifikasi Kesehatan Ikan
.3 Usaha Perikanan
.3 .1 Pelatihan Nelayan
.3 .2 Pembinaan wanita nelayan
.3 .3 Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP
.3 .4 Perbenihan
.4 Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
.4 .1 Ekspor Hasil Perikanan
.4 .2 Impor Hasil Perikanan
.4 .3 Pemasaran Dalam Negeri
.4 .4 Pengusaha perikanan
.5 Sarana Perikanan
.5 .1 Pelabuhan Perikanan Pantai
.5 .2 TPI/PPI
.5 .3 Kesyahbadaran
.5 .4 Peralatan penangkapan : Kapal, perahu, jaring, pump dsb
.6 Pengendalian hama dan penyakit
.6 .1 Penyakit Ikan
.6 .2 Hama Ikan
.6 .3 Obat-obatan termasuk sertifikasinya
.7 Konservasi dan Suaka Laut
.7 .1 Transplatasi bibit Karang
.7 .2 Terumbu Karang
.7 .3 Mangrove
.7 .4 Garam
.7 .5 Harta Karun di dalam laut
.7 .6 Pembinaan / Pendidikan masyarakat pesisir
524 Peternakan dan Kesehatan Hewan
.1 Produksi
.1 .1 Perbibitan
.1 .2 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
.1 .3 Budidaya

.1 .4 Susu Ternak Rakyat
.1 .5 Telur
.1 .6 Daging
.1 .7 Kulit
.2 Usaha Peternakan
.2 .1 Pelayanan Usaha
.2 .2 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
.2 .3 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
.3 Kesehatan Hewan
.3 .1 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
.3 .2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
.3 .3 Obat-obat Hewan
3 .4 Pelayanan Kesehatan Hewan
.4 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
.4 .1 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
.4 .2 Hygieni dan Sanitasi
.4 .3 Produk Hewani
.5 Laboratorium Kesehatan Hewan
.5 .1 Pengujian Mutu Asal Hewan
.5 .2 Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
.6 Inseminasi Buatan
.6 .1 Produksi Distribusi dan Pemasaran
.6 .2 Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
.7 Pembibitan dan Budi Daya Ternak
.7 .1 Ternak Non Ruminansia
.7 .2 Ternak Ruminansia
.8 Sarana Usaha Ternak
.8 .1 Pembibitan
.8 .2 Kandang Ternak
.9 Kesehatan Hewan
.9 .1 Penyakit Hewan
.9 .2 Pos Kesehatan Hewan
.9 .3 Test Pulorum
.9 .4 Karantina
.9 .5 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk upaya pencegahannya

.10 Makanan Ternak
.11 Tempat Pemotongan Hewan
.12 Data Peternakan

525 Perkebunan
.1 Program dan Pelaporan
.1 .1 Pelaporan
.1 .2 Monitoring
.1 .3 Statistik Perkebunan
.2 Produksi
.2 .1 Karet
.2 .2 T e h
.2 .3 Tembakau
.2 .4 T e b u
.2 .5 Cengkeh
.2 .6 Kelapa/ Kopra / Kelapa Sawit

.2 .7 Kopi
.2 .8 Kakao
.2 .9 Jenis Tanaman yang Lain
.3 Usaha Perkebunan
.3 .1 Benih
.3 .2 Pembibitan
.3 .3 Kelompok Tani
.3 .4 Kemitraan
.3 .5 Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
.3 .6 Pemasaran Hasil Perkebunan
.4 Perlindungan Tanaman
.4 .1 H a m a
.4 .2 Pestisida
.4 .3 Agensia Pengendalian Hayati
.5 Alat dan Mesin Perkebunan
.5 .1 Power Sprayer
.5 .2 Hand Sprayer
.5 .3 Polibag
.5 .4 Alat Laboratorium Perkebunan
.5 .5 Reagen
.5 .6 Sarana / Alat Produksi Perkebunan
.6 Pengolahan lahan
.6 .1 Terasering
.7 Pemasyarakatan
.7 .1 Penyuluhan
.7 .2 Sosialisasi
.7 .3 Informasi

526 Ketahanan Pangan
.1 Program Bimbingan Massal
.2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
.2 .1 Pembinaan Teknologi
.2 .2 Sarana Produksi dan Permodalan
.2 .3 Kelembagaan
.3 Agribisnis
.3 .1 Mutu Hasil
.3 .2 Pengelola Hasil Pangan
.3 .3 Pemasaran Hasil
.3 .4 Kementrian
.4 Distribusi Pangan
.4 .1 Sistem dan Pola Distribusi
.4 .2 Sarana dan Prasarana Distribusi
.4 .3 Pengadaan dan Cadangan Pangan
.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
.5 .1 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
.5 .2 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
.5 .3 Sistem Informasi Pangan

527 Penyuluhan
.1 Sumber Daya Manusia
.1 .1 Penyuluh
.1 .2 Pelaku Utama Pelaku Usaha
.1 .3 Stake holder

.2 Kelembagaan
.2 .1 Struktual
.2 .2 Non Struktual
.2 .3 Pelaku Utama Pelaku Usaha
.2 .4 Lembaga Profesi
.3 Penyelenggaraan Penyuluhan
.3 .1 Program / Metode
.3 .2 Promosi / pameran / kampanye
.3 .3 Penghargaan / Lomba
.3 .4 Materi

530 PERINDUSTRIAN
.1 Undang-undang Gangguan
531 Industri Logam
532 Industri Mesin / Elektronik
533 Industri Kimia / Farmasi
534 Industri Tekstil
535 Industri makanan / Minuman
536 Aneka Industri / Perusahaan
.1 Home Industri
537 Aneka Kerajinan
.1 Kerajinan Rakyat
538 Usaha Negara
.1 Perjan
.2 Perum
.3 Persero
539 Perusahaan Daerah

540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541 Minyak dan Gas Bumi
.1 Pengusahaan
.1 .1 Perijinan
.1 .2 Rekomendasi
.1 .3 Kontrak Karya
.1 .4 Pengolahan
.2 Penyaluran
.3 Tangki, Pompa, Tanker
542 Energi
1 Energi Alternatif
.1 .1 Gas Rawa
.1 .2 Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
.1 .3 Biogas
.1 .4 Energi baru terbarukan
.1 .5 Perijinan
.1 .6 Rekomendasi
.1 .7 Pembinaan dan Pengawasan
.2 Konservasi Energi
.3 Pemetaan Energi
.4 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
543 Pertambangan, mineral dan batubara
.1 Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
.1 .1 WIUP Batuan
.1 .2 WIUP Bukan Logam

.1 .3 WIUP Logam
.1 .4 WIUP Batubara
.2 Rekomendasi Teknis
.3 Perijinan
.3 .1 IUP Eksplorasi
3 .2 IUP Operasi Produksi
.3 .3 IUP Operasi Produksi Khusus
.3 .4 Ijin Usaha Jasa Pertambangan
.3 .5 Pencabutan Ijin
.4 Pembinaan
.5 Pengawasan
.5 .1 Pengawasan Usaha Pertambangan
.5 .2 Penerbitan Kegiatan Pertambangan
.6 Pasca Tambang
.6 .1 Reklamasi
.6 .2 Penutupan

544 Air Tanah
.1 Cekungan Air Tanah (CAT)
.1 .1 Pemetaan CAT
.1 .2 Imbuhan CAT
.1 .3 Lepasan CAT
.1 .4 Konservasi
.1 .5 Pengendalian Daya Rusak
.2 Rekomendasi Teknis
.3 Sumur Artesis
.4 Sumur Bor
.5 Sumur Gali (Pasak)
.6 Pengusaha Pengebor (APATINDO)
.7 Sumur Pantau
.8 Harga Dasar Air / Nilai Perolehan Air
.9 Hidrologi

545 Geologi
.1 Pemetaan
.2 Mitigasi Bencana Geologi
.3 Vulkanologi
.3 .1 Pengawasan Vulkanologi
.3 .2 Panas Bumi
.4 Hidrogeologi
.5 Gerakan Tanah (longsoran, amblesan)
.6 Pengawasan, pengendalian

546 Hidrologi
547 kesamudraan
548 Penghematan Energi

550 PERHUBUNGAN
551 Perhubungan Darat
.1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
.1 .1 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
.1 .2 Uji Kelayakan kendaraan Bermotor (Keur)
.1 .3 Kecelakaan Lalu Lintas
.2 Angkutan Jalan Raya
.2 .1 Perizinan

.2 .2 Terminal
.2 .3 Alat Angkutan
.2 .4 Jembatan Timbang / Lebih Muatan
.2 .5 Uji Mutu
.3 Angkutan Sungai
.3 .1 Keselamatan, Rambu-rambu
.3 .2 Lalu Lintas
.3 .3 Alur dan Kolam Pelabuhan
.3 .4 Trayek
.3 .5 Sarana / Kapal
.3 .6 Pelabuhan
.3 .7 Terminal
.3 .8 Kecelakaan
.3 .9 Perizinan
.4 Angkutan Danau
.4 .1 Keselamatan, Rambu-rambu
.4 .2 Lalu Lintas
.4 .3 Alur dan Kolam Pelabuhan
.4 .4 Trayek
.4 .5 Sarana / Kapal
.4 .6 Pelabuhan
.4 .7 Terminal
.4 .8 Kecelakaan
.4 .9 Perizinan
.5 Perkereta-Apian
.5 .1 Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
.5 .2 Prasarana (Jalan/Jembatan)
.5 .3 Trayek
.5 .4 Angkutan Penumpang
.5 .5 Angkutan Barang
.5 .6 Keselamatan
.5 .7 Kecelakaan
.5 .8 Perawatan / Perbaikan
.5 .9 Perizinan

552 Perhubungan Laut
.1 Lalu Lintas Angkatan Laut
.1 .1 Pelayaran Dalam Negeri
.1 .2 Pelayanan Luar Negeri
.1 .3 Pelayaran Haji
.1 .4 Pelayanan Charter / Wisata Turis
.1 .5 Pelayaran Khusus
.1 .6 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
.2 Perkapalan - Alat Angkutan
.2 .1 Kapal Penumpang
.2 .2 Kapal Barang
.2 .3 Kapal Perang / Patroli / Negara
.2 .4 Kapal Tanker
.2 .5 Ponton, Tongkong
.2 .6 Kapal Layar
.2 .7 Kapal Layar Motor
.2 .8 Kapal Kontainer
.3 Pelabuhan

.3 .1 Tanah / Lokasi
.3 .2 Alur Layar
.3 .3 Dermaga
.3 .4 Terminal Penumpang
.3 .5 Terminal Kontainer
.3 .6 Bantuan / Gedung / Gudang
.3 .7 Perlengkapan Tambat Labuh
.3 .8 Lapangan Penumpukan
.3 .9 Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
.4 Pengerukan / Perawatan
.4 .1 Alur Pelayaran
.4 .2 Kolam Pelabuhan
.4 .3 Reklamasi Pantai
.4 .4 Dumping Area
.4 .5 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
.5 Penjagaan Pantai
.5 .1 Patroli Bandar
.5 .2 Patroli Perairan
.5 .3 Penjagaan pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
.6 Angkutan Barang
.6 .1 P o s
.6 .2 Minyak
.6 .3 L o g
.6 .4 Ternak
.6 .5 Sembilan Bahan Pokok
.6 .6 Peti Kemas / EMKL
.6 .7 Muatan Umum
.6 .8 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
.6 .9 Bongkar Muatan
.7 Keselamatan
.7 .1 Rambu-rambu / Mercu suar
.7 .2 Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal
.7 .3 Fasilitas Keselamatan
.7 .4 Telekomunikasi Pelayaran
.7 .5 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
.7 .6 Sertifikasi Awak Kapal
.8 Kecelakaan, Gangguan
.8 .1 Kecelakaan Penumpang / Kapal
.8 .2 Kecelakaan Barang
.8 .3 Gangguan sarana / prasarana
.8 .4 Pembajakan/ penyelundupan
.8 .5 Pencemaran
.9 Perijinan
.9 .1 Ijin Berlayar
9 .2 Ijin Pekerjaan Bawah Air
.9 .3 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
.9 .4 Ijin Pembukaan Kantor Cabang
.9 .5 Ijin Usaha Angkutan Laut
.9 .6 Ijin Usaha Penunjang Angkatan Laut
.9 .7 Ijin Pelayaran Jasa Kepelabuhan
.9 .8 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus

.9 .9 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus

553 Perhubungan Udara

.1 Lalu Lintas Angkatan Udara

.1 .1 Penerbangan Domestik

.1 .2 Penerbangan Luar Negeri

.1 .3 Penerbangan Haju

.1 .4 Penerbangan Charter / Non Reguler

.1 .5 Penerbangan Khusus / Jembatan Udara

.2 Pelabuhan Udara

.2 .1 Tanah / Lokasi

.2 .2 Landasan

.2 .3 Appron

.2 .4 Terminal Penumpang

.2 .5 Terminal Cargo

.2 .6 Bangunan / Gedung

.2 .7 Perlengkapan

.2 .8 Parkir Kendaraan

.3 Alat Angkutan

.3 .1 Pesawat Udara

.3 .2 Helikopter

.4 Angkutan Barang

.4 .1 Pos

.4 .2 Muatan Dalam Negeri

.4 .3 Muatan Luar Negeri

.4 .4 EMPU

.5 Sertifikasi Kelaikan

.5 .1 Kelaikan Pesawat Udara

.5 .2 Kelaikan Peralatan Penunjang

.5 .3 Kelaikan Personil / Awak Kapal

.6 Keselamatan

.6 .1 Rambu-rambu

.6 .2 Perakitan / Kalibrasi

.6 .3 Fasilitas keselamatan

.6 .4 Telekomunikasi Penerbangan

.7 Kecelakaan / Gangguan

.7 .1 Kecelakaan Penumpang

.7 .2 Kecelakaan Barang

.7 .3 Gangguan sarana / prasarana

.7 .4 Pembajakan

.7 .5 Pencemaran

.8 Umum

.8 .1 Asuransi

.8 .2 Asosiasi

.8 .3 SATPAM

.8 .4 Rally Udara / Lomba

.9 Perizinan

.9 .1 Izin Terbang / Flight Approval

.9 .2 Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU

.9 .3 Pembukaan Kantor Cabang

.9 .4 Rekomendasi Ketinggian Bangunan

.9 .5 Pembangunan Bandar Udara Khusus

554 Pos

.1 Pembinaan
.1 .1 Kebutuhan Fasilitas
.1 .2 Rehabilitasi / Perwatan
.1 .3 Bina Usaha / Pengawasan / Penawaran
.1 .4 Standarisasi Perangkat
.1 .5 Tanah / Bangunan
.1 .6 Filateli
.1 .7 Asosiasi
.1 .8 Laporan dan Evaluasi
.2 Pelayanan
.2 .1 Jasa Pos
.2 .2 Jasa Titipan
.2 .3 Jasa Giro
.2 .4 Benda Pos / Perangko
.2 .5 Sampul Peringatan
.2 .6 Jasa Pos Elektronik
.3 Perijinan
.3 .1 Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
.3 .2 Pembukaan Agen / Cabang
.4 Gangguan Sarana dan Prasarana
.4 .1 Kecelakaan
.4 .2 Sabotase
.4 .3 Penyelundupan
555 Teknologi Informasi
.1 Kebijakan
.2 Peralatan
.2 .1 Telepon
.2 .2 Internet / USO
.2 .3 Telegram, Telex / SBB, Faximile
.2 .4 Satelit, Stasiun Bumi
.2 .5 Radio Komunikasi
.3 Sistem
.4 Pembinaan / Penerbitan
.5 Perijinan
556 Pariwisata dan Rekreasi
.1 Usaha Pariwisata
.1 .1 Usaha Jasa Pariwisata
.1 .1 .1 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
.1 .1 .2 Restoran dan Rumah Makan
.1 .2 Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
.1 .3 Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
.1 .4 Ijin Usaha Sarana
.1 .4 .1 Ijin Pariwisata
.1 .4 .2 Ijin Usaha Pariwisata
.1 .4 .3 Ijin Usaha Jasa Pariwisata
.1 .4 .4 Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
.1 .4 .5 Ijin Usaha Sarana
.1 .5 Wisatawan
.1 .5 .1 Wisatawan Nusantara
.1 .5 .2 Wisatawan Mancanegara
.1 .6 Promosi dan Informasi Pariwisata
.1 .6 .1 Dalam Negeri

.1 .6 .2 Luar Negeri
.2 Perhotelan
.2 .1 Status Hotel
2 .2 Kelas Hotel
.2 .3 T a r I f
.3 Travel Service
.3 .1 Pramu Wisata
.3 .2 Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
.3 .3 Souvenir
.3 .4 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
.4 Tempat Rekreasi
.4 .1 Obyek dan Daya Tarik Wisata
.4 .1 .1 Ciptaan Tuhan
.4 .1 .2 Hasil Karya Manusia
.4 .2 Rehabilitasi / Perawatan
.4 .3 Pengembangan Fasilitas
.4 .4 Tanah / Bangunan
.4 .5 Bina Usaha
.4 .6 Institusi
.4 .6 .1 Asosiasi
.4 .6 .2 Lembaga Kepariwisataan

557 Meteorologi
.1 Curah Hujan
.2 Hujan Buatan
.3 Peneropongan Bintang
.4 Ramalan Cuaca
.5 Kemarau Panjang

560 TENAGA KERJA
.1 Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
.1 .1 Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
.2 Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI
.3 Rekruitmen Calon TKI / TKW
.4 Seleksi Naker Ke Luar Negeri
.4 .1 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
.4 .2 Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
.4 .3 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
.5 Persyaratan Naker TKI / TKW
.5 .1 Permohonan Rekomendasi Passport
.5 .2 Perjanjian Kerja TKI / TKW
.5 .3 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
.5 .4 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
.5 .5 Pelatihan TKI / TKW
.6 Pemberangkatan Naker
.6 .1 Pemberangkatan Ke Luar Negeri
.6 .2 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW Ke Luar Negeri
.6 .3 Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
.7 Pemulangan Naker
.7 .1 Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
.7 .2 Pemulangan TKI / TKW Ilegal
.7 .3 TKI / TKW Terkena Kasus Pidana

.8 Pengangguran

561 Upah

.1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional

.2 Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah

.3 Kebutuhan Fisik Minuman

.4 Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)

.5 Laporan Data Remintance

.6 Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW

562 Penempatan

.1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)

.1 .1 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)

.1 .2 Penempatan Naker Non Terdidik Non Profesional

.1 .3 Pengembangan Kesempatan Berusaha / Peluasan Kerja

.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KLB)

.3 Lembaga Penyalur Naker

.3 .1 Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)

.3 .2 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS / BKK)

.3 .3 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)

563 Latihan Kerja

.1 Pendidikan Kerja

.1 .1 Pendidikan dan Latihan Kerja

.1 .2 Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)

.1 .3 Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)

.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja

.2 .1 Tempat Pelatihan (BLK)

.2 .2 Instruktur / Pelatihan

.2 3 Modul / Silabus dan Bahan Praktek

.2 4 Kurikulum dan Metode Pengajaran

.2 5 Sertifikat

.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja

564 Tenaga Sukarela

.1 Butsi

.2 Padat Karya

565 Perselisihan Kerja

.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker

.1 .1 Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER

.1 .2 Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER

.1 .3 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER

.1 .4 Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER

.1 .5 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)

.1 .6 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)

.1 .7 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)

.1 .8 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)

.2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja

566 Keselamatan Kerja

.1 Instalasi Proteksi Kebakaran

.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja

.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja

4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan

.5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
.6 Pengujian dan hasil Pemeriksaan Hyperkes
.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
.8 Perlengkapan Sarana Kerja
.8 .1 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat angkat/angkut)
.8 .2 Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
.8 .3 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
.8 .4 Pemasangan dan Pemakaian Tangki tak Bertekanan
.8 .5 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (Shift Malam)
567 Pemutusan Hubungan Kerja
.1 Pengaduan PHK Sepihak
.2 PHK Massal
.3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
.4 Ijin Melakukan PHK
.5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
.6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang Di PHK
.7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK
568 Kesejahteraan Pekerja
.1 Bantuan Kredit / bantuan Modal Kerja bagi Naker
.1 .1 Pemilihan Pekerja Teladan
.2 Perumahan Pekerja
.3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
.4 Koperasi Pekerja
.5 Sarana Transportasi Pekerja
.6 Perpustakaan Pekerja
.7 Tempat Ibadah Pekerja
.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
.9 .1 Lembaga Kerjasama Bipartid
569 Tenaga Kerja Orang Asing
.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
.4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
.5 Data Tenaga Kerja Asing
.6 Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing
.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
.9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

570 PENANAMAN MODAL
.1 Penanaman Modal Dalam Negeri
.2 Penanaman Modal Luar Negeri
571 Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
572 Pasar Uang dan Modal
573 Saham
574 Modal Domestik

580 PERBANKAN MONETER
581 Kredit
582 Inventasi
583 Tabungan

.1 Deposito
.2 Tabanas
.3 Taska
.4 Tapelpram

584 Bank Pembangunan Daerah
.1 Bank Jateng
.2 BKK, BPR BKK, Bank Pasar

585 Asuransi
.1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
.2 Polis
.3 Premi
.4 Tertanggung / Pemegang Polis
.5 Uang Pertanggungan

586 Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer

587 Fiscal

588 Hutang Negara Obligasi

589 Moneter

590 AGRARIA

591 Tata Guna Tanah
.1 Pemetaan dan Pengukuran
.2 Perpetaan
.3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
.4 Fatwa Tata Guna Tanah
.5 Tanah Kritis

592 Landreform
.1 Redistribusi
.1 .1 Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
.1 .2 Penentuan Tanah Obyek Landreform
.1 .3 Pembagian Tanah Landreform
.1 .4 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
.2 Ganti Rugi
.2 .1 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
.2 .2 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
.2 .3 Ganti Rugi Tanah Absentee
.2 .4 Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
.2 .5 Ganti Rugi Tanah Partikelir
.2 .6 Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
.3 Bagi Hasil
.3 .1 Penetapan Imbangan Gadai Tanah
.3 .2 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
.3 .3 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
.4 Gadai Tanah
.4 .1 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
.4 .2 Pelaksanaan Gadai Tanah
.4 .3 Sengketa Gadai Tanah
.5 Bimbingan dan Penyuluhan
.6 Pengembangan
.7 Yayasan Dana Landreform (YDL)

593 Pengurusan Hak-hak Tanah
.1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
.1 .1 Sewa Tanah

.1 .2 Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus

.2 Hak Milik

.2 .1 Perorangan

.2 .2 Badan Hukum

.3 Hak Pakai

.3 .1 Perorangan

.3 .1 .1 Warga Negara Indonesia

.3 .1 .2 Warga Negara Asing

.3 .2 Badan Hukum

.3 .2 .1 Badan Hukum Indonesia

.3 .2 .2 Badan Hukum Asing, Kedutaan Konsulat, Kantor Dagang Asing

.3 .3 Tanah Gedung-Gedung Negeri

.4 Guna Usaha

.4 .1 Perkebunan Besar

.4 .2 Perkebunan Rakyat

.4 .3 Peternakan

.4 .4 Perikanan

.4 .5 Kehutanan

.5 Hak Guna Bangunan

.5 .1 Perorangan

.5 .2 Badan Hukum

.5 .3 P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)

.5 .4 Badan Hukum Asing Belanda-PBK No. 5/56

.5 .5 Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)

.6 Hak Pengelolaan

.6 .1 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate

.6 .2 Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan

.7 Sengketa Tanah

.7 .1 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)

.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah

.8 .1 Pencabutan Hak

.8 .2 Pembebasan Tanah

.8 .3 Ganti Rugi Tanah

594 Pendaftaran Tanah

.1 Pengukuran / Pemetaan

.1 .1 Fotogrametri

.1 .2 Terristris

.1 .3 Triangulasi

.1 .4 Peralatan

.2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6 / 1960)

.3 Sertifikat

.4 Penjabat Pembuatan Akte Tanah

595 Transmigrasi

.1 Tata Guna Tanah

.2 Landreform

.3 Pengurusan Hak-hak Tanah

.4 Pendaftaran Tanah

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

601 Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi

602 Kontraktor Pemborong
.1 Tender
.2 Penunjukan
.3 Prakualifikasi
.3 .1 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
.3 .2 Tanda Daftar Rekanan (TDR)
603 Arsitektur
604 Bahan Bangunan
.1 Tanah dan Batu
.2 Aspal
.3 Besi dan logam lainnya
.3 .1 Besi beton
.3 .2 Besi Profil (konstruksi)
.3 .3 Paku
.3 .4 Alumunium profil
.4 Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
.5 S e m e n
.6 K a y u
.7 Bahan penutup Atap
.8 Alat-alat penggantung dan pengunci
.9 Bahan -bahan bangunan lainnya
605 I n s t a l a n s i
.1 Instalansi bangunan
.2 Instalansi listrik
.3 Instalansi air/sanitasi
.4 Instalansi pengatur udara
.5 Instalansi akustik
.6 Instalansi cahaya/penerangan
606 Konstruksi pencegahan
.1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
.2 Terhadap gempa
.3 Terhadap angin/udara/panas
.4 Terhadap Kegaduhan
.5 Terhadap gas/explosive
.6 Terhadap serangga
.7 Terhadap radiasi atom

610 P E N G A I R A N
611 Irigasi
.1 Bangunan Waduk
.1 .1 Bendungan
.1 .2 Tanggul
.1 .3 Pelimpahan banjir
.1 .4 Menara pengambilan
.1 .5 Pembangunan dermaga
.2 Bangunan pengambilan
.2 .1 Bendungan
.2 .2 Bendungan dengan pintu bilas
.2 .3 Bendungan dengan pompa
.2 .4 Pengambilan bebas
.2 .5 Pengambilan bebas dengan pompa

.2 .6 Sumur dengan pompa
.2 .7 Kantung lumpur
.2 .8 Silt ekstretor
.2 .9 Escope channel
.3 Bangunan pembawa
.3 1 Saluran
.3 1 1 Saluran Induk
.3 1 2 Saluran Sekunder
.3 1 3 Suplesi
.3 1 4 Tersier
.3 .1 .5 Saluran kwarter
.3 .1 .6 Saluran pasangan
.3 .1 .7 Saluran tertutup / terowongan
.3 .2 Bangunan
.3 .2 .1 Bangunan pagi
.3 .2 .2 Bangunan dan sadap
.3 .2 .3 Bangunan sadap
.3 .2 .4 Bangunan check
.3 .2 .5 Bangunan Terjun
.3 .3 Bax Tersier
.3 .4 Got miring
.3 .5 Talang
.3 .6 Syphon
.3 .7 Gorong-gorong
.3 .8 Pelimpahan samping
.4 Bangunan Pembangunan
.4 .1 Saluran
.4 .1 .1 Saluran Pembuangan Induk
.4 .1 .2 Saluran Pembuangan Sekunder
.4 .1 .3 Saluran Pembangunan Tersier
.4 .2 Bangunan
.4 .2 .1 Bangunan Out let
.4 .2 .2 Bangunan terjun
.4 .2 .3 Bangunan penahan banjir
.4 .3 Gorong-gorong pembuangan
.4 .4 Talang Pembuangan
.4 .5 Syphon pembuangan
.5 Bangunan Lainnya
.5 .1 Jalan
.5 .1 .1 Jalan Inspeksi
.5 .1 .2 Jalan Logistik
.5 .2 Jembatan
.5 .2 .1 Jembatan inspeksi
.5 .2 .2 Jembatan hewan
.5 .3 Tangga cuci
.5 .4 Kubangan kerbau
.5 .5 Waduk lapangan
.5 .6 Bangunan penunjang
.5 .7 Jaringan telepon
.5 .8 Stasiun Argo
.5 .9 Bangunan TPI dan pasar iklan

.1 Tanggul keliling
.1 .1 Tanggul
.1 .2 Bangunan penutup sungai
.1 .3 Jembatan
.2 Bangunan pembawa
.2 .1 Saluran
.2 .1 .1 Saluran muka
.2 .1 .2 Saluran pembawa induk
.2 .1 .3 Saluran pembawa sekunder
.2 .1 .4 Saluran stasium pompa pemasukan
.2 .2 Bangunan bagi :
.2 .2 .1 Gorong-gorong
.2 .2 .2 Syphon
.3 Bangunan pembuangan
.3 .1 Stasiun pompa pembangunan
.3 .2 Saluran
.3 .2 .1 Saluran pembawa induk
.3 .2 .2 Saluran pembawa sekunder
.3 .2 .3 Saluran Pembuangan Induk
.3 .2 .4 Saluran Pembuangan Sekunder
.3 .3 Pintu air pembuangan
.3 .4 Gorong-gorong pembuangan
.3 .5 Syphon pembuangan
.4 Bangunan lainnya
.4 .1 Bangunan
.4 .1 .1 Bangunan pengukur air
.4 .1 .2 Bangunan Pengukur Curah Hujan
.4 .1 .3 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
.4 .1 .4 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
.4 .2 Rumah Petugas Eksploitasi

613 Pasang surut
.1 Bangunan pembawa
.1 .1 Saluran
.1 .1 .1 Saluran Pembawa Induk
.1 .1 .2 Saluran Pembawa Sekunder
.1 .1 .3 Saluran Pembawa Tersier
.1 .1 .4 Saluran Penyimpanan Air
.1 .1 .5 Saluran Pintu Pembuangan
.2 Bangunan pembuangan
.2 .1 Saluran
.2 .1 .1 Saluran Pembawa Induk
.2 .1 .2 Saluran Pembawa Sekunder
.2 .1 .3 Saluran Pembawa Tersier
.2 .1 .4 Saluran Penyimpanan Air
.2 .1 .5 Saluran Pintu Pembuangan
.2 .1 .6 Saluran Pembuang Induk
.2 .1 .7 Saluran Pembuang Sekunder
.2 .1 .8 Saluran Pembuang Tersier
.2 .1 .9 Saluran Pengumpul Air
.2 .2 Bangunan Pintu Pembuang
.3 Bangunan lainnya
.3 .1 Kolom pasang

.3 .2 Saluran
.3 .2 .1 Saluran Lalu Lintas
.3 .2 .2 Saluran Muka
.3 .3 Bangunan
.3 .3 .1 Bangunan Penangkis Kotoran
.3 .3 .2 Bangunan Pengukur Muka air
.3 .3 .3 Bangunan Pengukur Curah Hujan
.3 .4 Jalan
.3 .5 Jembatan

614 Pengendalian Sungai
.1 Bangunan pengaman
.1 .1 Tanggul banjir
.1 .2 Pintu Pengatur Banjir
.1 .3 Klep Pengatur Banjir
.1 .4 Tembok pengaman talut
.1 .5 K r i b
.1 .6 Kantung lumpur
.1 .7 Check Dam
.1 .8 Syphon
.2 Saluran Pengaman
.2 .1 Saluran Banjir
.2 .2 Saluran Drainage
.2 .3 Corepure
.3 Bangunan lainnya
.3 .1 Warning System
.3 .2 Stasiun
.3 .2 .1 Stasiun Pengukur curah hujan
.3 .2 .2 Stasiun Pengukur Air
.3 .2 .3 Stasiun Pengukur Cuaca
.3 .2 .4 Stasiun Pos Penjagaan

615 Pengaman Pantai
.1 Tanggul
.2 K r i b
.3 Bangunan lainnya

616 Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
.1 Stasiun Pompa
.2 Bangunan Pembawa
.3 Bangunan Pembuangan
.4 Bangunan lainnya

620 J A L A N

621 Jalan Kota / Kabupaten
.1 Daerah Penguasaan
.1 .1 T a n a h
.1 .2 Tanaman
.1 .3 Bangunan
.2 Bangunan Sementara
.2 .1 Jalan Sementara
.2 .2 Jembatan Sementara
.2 .3 Kantor Proyek
.2 .4 Gedung Proyek
.2 .5 Barak Kerja

.2 .6 Laboratorium Lapangan
.2 .7 R u m a h
.3 Badan Jalan
.3 .1 Pekerjaan Tanah (earth work)
.3 .2 Stabilisasi
.4 Perkerasan
.4 .1 Lapisan Pondasi Bawah
.4 .2 Lapisan Pondasi
.4 .3 Lapisan Permukaan
.5 Drainage
.5 .1 Parit Tanah
.5 .2 Gorong-gorong (culvert)
.6 Buku Trotoir
.6 .1 Tanah
.6 .2 Perkerasan
.6 .3 Pasangan
.7 M e d i u m
.7 .1 T a n a h
.7 .2 Tanaman
.7 .3 Perkerasan
.7 .4 Pasangan
.8 Daerah Sampingan
.8 .1 Tanaman
.8 .2 Pagar
.9 Bangunan Pelengkap dan Pengaman
.9 .1 Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
.9 .2 Lampu Penerangan
.9 .3 Lampu Pengaturan Lalu Lintas
.9 .4 Patok-patok KM
9 .5 Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
.9 .6 Rel Pengamanan
.9 .7 P a g a r
.9 .8 Turap Penahan
.9 .9 Bronjong
622 Jalan Provinsi
1 Daerah Penguasaan
.1 .1 Tanah
.1 .2 Tanaman
.1 .3 Bangunan
.1 .4 Jalan Sementara
.1 .5 Jembatan Sementara
.1 .6 Kantor / Gedung Proyek
.1 .7 Barak kerja
.1 .8 Laboratorium lapangan
.1 .9 Rumah
.2 Badan Jalan
.2 .1 Pekerjaan Tanah (earth work)
.2 .2 Stabilisasi
.3 Perkerasan (Pavement)
.3 .1 Lapis Pondasi Bawah
.3 .2 Lapis Pondasi
.3 .3 Lapis Permukaan

.4 Drainage
.4 .1 Parit
.4 .2 Gorong-gorong (culvert)
.4 .3 Buku Trotoir
.4 .4 Tanah
.4 .5 Perkerasan
.5 Trotoir
.5 .1 Tanah
.5 .2 Perkerasan
.6 Medium
.6 .1 Tanah
.6 .2 Tanaman
.6 .3 Perkerasan
.6 .4 Pasangan
.7 Daerah Sampingan
.7 .1 Tanaman
.7 .2 Pagar
.8 Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
.8 .1 Rambu-rambu
.8 .2 Lampu Penerangan
.8 .3 Lampu Pengaturan Lalu Lintas
.8 .4 Patok-patok KM
.8 .5 Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
.8 .6 Rel Pengamanan
.8 .7 Pagar
.8 .8 Turap Penahan
.8 .9 Bronjong
.9 Bangunan Sementara
.9 .1 Jalan Sementara
.9 .2 Jembatan Sementara
.9 .3 Kantor Proyek
.9 .4 Gudang Proyek
.9 .5 Barak Kerja
.9 .6 Laboratorium Lapangan
.9 .7 Rumah

623 Jalan Nasional
.1 Daerah Penguasaan
.2 Badan Jalan
.3 Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
.4 Drainase (gorong-gorong, parit)
.5 Median
.6 Daerah samping (pagar, tanaman)
.7 Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)

630 JEMBATAN
631 Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten
.1 Daerah Penguasaan
.1 .1 Tanah
.1 .2 Tanaman
.1 .3 Bangunan
.2 Bangunan Sementara
.2 .1 Jalan Sementara

.2 .2 Jembatan Sementara
.2 .3 Kantor Proyek
.2 .4 Gedung Proyek
.2 .5 Barak kerja
.2 .6 Laboratorium lapangan
.2 7 Rumah
.3 Pekerjaan Tanah (earth work)
.3 .1 Galian Tanah
.3 .2 Timbunan Tanah
.4 Pondasi
.4 .1 Pondasi kepala jembatan
.4 .2 Pondasi pilar
.4 .3 Pondasi angker
.5 Bangunan bawah
.5 .1 Kepala Jembatan
.5 .2 Pilar
.5 .3 Piloon
.5 .4 Landasan
.6 Bangunan
.6 .1 Gelagar
.6 .2 Lantai
.6 .3 Perkerasan
.6 .4 Jalan orang / trotoir
.6 .5 Sandaran
.6 .6 Talang air
.7 Bangunan pengaman
.7 .1 Turap/penahan
.7 .2 Bronjong
.7 .3 Strek Dam
.7 .4 Kist Dam
.7 .5 Coupute
.7 .6 Krip
.8 Bangunan Pelengkap
.8 .1 Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
.8 .2 Patok pengamanan
.8 .3 Patok R.O.W
.9 Oprit
.9 .1 Badan
.9 .2 Perkerasan
.9 .3 Drainage
.9 .4 Baku
.9 .5 Mediun

632 Jembatan pada Jalan Provinsi
.1 Daerah Penguasaan
.1 .1 Tanah
.1 .2 Tanaman
.1 .3 Bangunan
.2 Bangunan Sementara
.2 .1 Jalan Sementara
.2 .2 Jembatan Sementara
.2 .3 Kantor Proyek
.2 .4 Gedung Proyek

.2 .5 Barak kerja
.2 .6 Laboratorium lapangan
.2 .7 Rumah
.3 Pekerjaan Tanah (earth work)
.3 .1 Galian Tanah
.3 .2 Timbunan Tanah
.4 Pondasi
.4 .1 Pondasi kepala jembatan
.4 .2 Pondasi Pilar
.4 .3 Pondasi angker
.5 Bangunan bawah
.5 .1 Kepala Jembatan
.5 .2 Pilar
.5 .3 Piloon
.5 .4 Landasan
.6 Bangunan
.6 .1 Gelagar
6 .2 Lantai
.6 .3 Perkerasan
.6 .4 Jalan orang / trotoir
.6 .5 Sandaran
.6 .6 Talang air
.7 Bangunan Pengaman
.7 .1 Turap / Penahan
.7 .2 Bronjong
.7 .3 Strek Dam
.7 .4 Kist Dam
.7 .5 Coupute
.7 .6 Krip
.8 Bangunan Pelengkap
.8 .1 Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
.8 .2 Patok pengamanan
.8 .3 Patok R.O.W (sempadan)
.9 Oprit
.9 .1 Badan
.9 .2 Perkerasan
.9 .3 Drainage
.9 .4 Baku
.9 .5 Mediun

633 Jembatan pada jalan Nasional
1 Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)
.2 Bangunan Sementara (gudang proyek, kantor proyek)
.3 Pondasi
.4 Bangunan bawah
.5 Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
.6 Bangunan Pengaman (bronjong strek dam, krib)
.7 Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)

640 BANGUNAN
641 Bangunan Pemerintah
.1 Gedung Pengadilan
.2 Rumah Pejabat Negara

.3 Gedung DPR
.4 Gedung Balai Kota
.5 Penjara
.6 Perkantoran

642 Bangunan Pendidikan
.1 Taman Kanak-kanak
.2 SD & Sekolah Menengah
.3 Perguruan Tinggi

643 Bangunan Rekreasi
.1 Bangunan Olah Raga
.2 Gedung Kesenian
.3 Gedung Pemancar

644 Bangunan Perdagangan
.1 Pusat Perbelanjaan
.2 Gedung Perdagangan
.3 B a n k
.4 Perkantoran

645 Bangunan Pelayanan Umum
.1 Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
.2 Gedung Parkir
.3 Rumah Sakit
.4 Gedung Telkom
.5 Terminal Angkutan Umum
.6 Terminal Angkutan Air
.7 Terminal Angkutan Darat
.8 Bangunan Keagamaan

646 Bangunan Peninggalan Sejarah
.1 Monumen
.2 Candi
.3 Kraton
.4 Rumah Tradisional

647 Bangunan Industri

648 Bangunan Tempat Tinggal
.1 Rumah Perkantoran
.1 .1 Inti / sederhana
.1 .2 Sedang / Mewah
.2 Rumah Pedesaan
.2 .1 Rumah Contoh
.3 Real Estate

649 Elemen Bangunan
.1 Pondasi
.1 .1 Diatas Tiang
.2 Dinding
.2 .1 Penahan beban
.2 .2 Tidak menahan beban
.3 A t a p
.4 Lantai / langit-langit
.4 .1 Suspended
.4 .2 Solit
.5 Pintu / Jendela
.5 .1 Pintu Hermonik
.5 .2 Pintu biasa

.5 .3 Pintu Sorong
.5 .4 Jendela Kayu
.5 .5 Jendela Sorong
.5 .6 Jendela Vertikal

650 TATA RUANG KOTA
651 Daerah Perdagangan / pelabuhan
.1 Daerah Pusat Perbelanjaan
.2 Daerah Perkantoran
652 Daerah Pemerintahan
653 Daerah Perumahan (site & servei)
.1 Kepadatan Rendah (low density)
.2 Kepadatan Tinggi (high density)
654 Daerah Industri
.1 Industri Berat
.2 Industri Ringan
.3 Industri Rumah (home industri)
655 Daerah Rekreasi (open spece)
.1 Publik Garden
.2 Sport & playing fields
.3 Open Space
656 Transportasi (tata letak)
.1 Jaringan jalan
.1 .1 Penerangan Jalan
.2 Jaringan Kereta Api
.3 Jaringan Sungai
657 Assineering
.1 Saluran Pengumpulan
.2 Instansi Pengolahan
.2 .1 Bangunan
.2 .2 Bangunan Penyaring
.2 .3 Bangunan Penghancur Kotoran
.2 .4 Bangunan Pengendapan
.2 .5 Bangunan Pengering Lumpur
.2 .6 Unit Disinfektan
.2 .7 Unit Perpompaan
658 Kesehatan Lingkungan
.1 Persampahan
.1 .1 Bangunan Pengumpulan
.1 .2 Bangunan Pemusnahan
.2 Pengotoran Udara
.3 Pengotoran Air
.3 .1 Air Buangan Industri
.4 Kegaduhan
.5 Kebersihan kota

660 TATA LINGKUNGAN
1 Lingkungan Hidup
.2 Kebersihan Lingkungan
.3 Pencemaran
.3 .1 Pencemaran Air
.3 .2 Pencemaran Udara
.3 .3 Pencemaran Tanah

.3 .4 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661 Kerusakan Lingkungan
.1 Konservasi Pesisir dan Laut
.2 Konservasi Sumber Daya Alam
662 Pentataan Hukum Lingkungan
663 Laboratorium Lingkungan
.1 Air
.2 Udara
.3 Tanah
664 Analisis Dampak Lingkungan
665 Pengembangan Teknologi Lingkungan
666 Pengembangan Kapasitas
667 Pengamanan Lingkungan
668 Pusat Pertumbuhan
669 Daerah Hutan

670 KETENAGAAN
.1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671 Listrik
.1 Kelistrikan
.1 .1 Perijinan
.1 .2 Rekomendasi
.1 .3 Pembinaan dan Pengawasan
.1 .1 Kelistrikan PLN
.1 .2 Kelistrikan non PLN
.2 Pembangkit Tenaga Listrik
.2 .1 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
.2 .2 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
.2 .3 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
.2 .4 PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
.2 .5 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
.2 .6 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
.2 .7 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
.3 Transmisi Tenaga Listrik
.3 .1 Gardu Induk / gardu penghubung / gardu trafo
.3 .2 Saluran Udara Tenaga Listrik
.3 .3 Kabel Bawah Tanah
.4 Distribusi Tenaga Listrik
.4 .1 Gardu Distribusi
.4 2 Tegangan Menengah
.4 .3 Tegangan Rendah
.4 .4 Jaringan Bawah Tanah
.5 Pengusahaan Listrik
.5 .1 Sambungan Listrik
.5 .2 Penjualan Tenaga Listrik
.5 .3 Tarif Listrik
672 Tenagan Air
673 Tenaga Minyak
674 Tenaga Gas
675 Tenaga Matahari
676 Tenaga Nuklir
677 Tenaga Panas Bumi

678 Tenaga Uap
679 Tenaga Lainnya

680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM

690 AIR MINUM
691 Intako
.1 Bromcaptering
.2 Sumur
.3 Bendungan
.4 Saringan (screen)
.5 Pintu air
.6 Saluran Pembawa
.7 Alat ukur
.8 Perpompaan
692 Transmisi Air Baku
.1 Perpipaan
.2 Katup Udara (Air Rolief)
.3 Tutup penguras (Blow oof)
.4 Bak Pelepas tekanan
.5 Jembatan pipa
.6 syphon
693 Instalasi Pengelolaan
.1 Bangunan Ukur
.2 Bangunan Aerasi
.3 Bangunan Pengendapan
.4 Bangunan Pembubuh bahan kimia
.5 Bangunan Pengaduk
.6 Bangunan Saringan
.7 Perpompaan
.8 Clear Hell
694 Distribusi
.1 Reservoir menara bawah tanah
.1 .1 Menara
.1 .2 Reservoir menara bawah tanah
.2 Perpipaan
.3 Perpompaan
.4 Jembatan pipa
.5 syphon
.6 Hydran
.6 .1 Hydran Umum
.6 .2 Hydran Kebakaran
.7 Katup Udara (Air Rolief)
.7 .1 Katup Udara (air relief)
.7 .2 Katup pelepas (blow off)
.8 Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)

700 PENGAWASAN
.1 Kebijakan dan program pengawasan
.2 Pengawasan perencanaan pengadaan / proyek
701 Bidang Urusan Dalam
702 Bidang Peralatan
703 Bidang Kekayaan Daerah

.1 Pengawasan Inventarisasi Asset

704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi

.1 Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen

705 Bidang Perencanaan

706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan

.1 Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana

707 Bidang Penelitian

.1 Pengawasan Penelitian / Riset

708 Bidang Konferensi

.1 Pengawasan Pertahanan/ BPN

709 Bidang Perjalanan Dinas

.1 Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi

710 BIDANG PEMERINTAHAN

711 Bidang Pemerintahan Pusat

712 Pengawasan Pemerintahan Provinsi

713 Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

714 Pengawasan Pemerintahan Desa

715 Bidang MPR/DPR

716 Bidang DPRD Provinsi

717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota

718 Bidang Hukum

719 Bidang Hubungan Luar Negeri

720 BIDANG POLITIK

721 Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll

722 Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam

723 Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh / tani dan kepemudaan

724 Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME

725 Bidang Pemuda

726 Bidang Pemilihan Umum

730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN

731 Pengawasan Kesbangpolinmas

732 Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (SAR)

733 Bidang Pertahanan

734 Bidang Kemiliteran

735 Bidang Perlindungan Masyarakat

736 Bidang Keamanan

737 Bidang Kejahatan

738 Bidang Bencana

739 Bidang Kecelakaan

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

741 Pengawasan Pembangunan Desa

742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan

743 Pengawasan Kebudayaan

744 Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat

745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)

746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial

747 Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi

748 Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
749 Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat

750 BIDANG PEREKONOMIAN
751 Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
752 Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753 Pengawasan Kehutanan
754 Pengawasan Pertambangan / ESDM
755 Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
756 Pengawasan Kenaga Kerja dan Ketransmigrasian
757 Pengawasan PMDN / PMA
758 Pengawasan Perbankan / Moneter
759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
761 Pengawasan Pengairan
762 Pengawasan Jalan
763 Pengawasan Jembatan
764 Pengawasan Bangunan
765 Pengawasan Tata Ruang Kota
766 Pengawasan Tata Lingkungan
767 Pengawasan Ketenagaan
768 Pengawasan Air Minum

770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771 Penyimpangan Pejabat Publik

780 BIDANG KEPEGAWAIAN
781 Bidang Pengadaan PNS
.1 Pengawasan Pengadaan PNS
.2 Persengketaan PNS
782 Bidang Mutasi Pegawai
783 Bidang Kedudukan Pegawai
.1 Penyimpangan Pejabat Publik
784 Bidang Kersejahteraan Pegawai
785 Bidang Cuti
786 Bidang Penilaian
.1 Pengawasan Penilaian dan Disiplin
787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
.1 Keanggotaan PNS dan Parpol

790 BIDANG KEUANGAN
791 Bidang Anggaran
.1 Pengawasan Anggaran
792 Bidang Otorisasi
793 Bidang Verifikasi
794 Bidang Pembukuan
.1 Pengawasan Akuntansi
795 Bidang Perbendaharaan
1 Pengawasan Perbendaharaan
796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan
.1 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
797 Bidang Pendapatan

.1 Pengawasan Pendapatan

799 Bidang Bendaharaan

800 KEPEGAWAIAN

.1 Perencanaan

.2 Penelitian

.1 Pengaduan

.2 Tim

.3 Statistik

.4 Peraturan Perundang-undangan

810 PENGADAAN

811 .1 Pendaftaran CPNS

.2 Testing

.3 Screening

Pengumuman tes dan Pemanggilan

812 Pengujian Kesehatan

813 .1 Pengangkatan CPNS

.2 Pengangkatan CPNS Golongan I

.3 Pengangkatan CPNS Golongan II

Pengangkatan CPNS Golongan III

814 Pengangkatan Tenaga Lepas

.1 Pengankatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak

.2 Pengangkatan Tenaga Harian

.3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan

820 MUTASI

821 .1 Pengangkatan

.1 .1 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

.1 .2 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I

.1 .3 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II

.1 .4 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III

.1 .5 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

.1 .6 Pengangkatan Kembali PegawaiNegeri Sipil yang Cuti diluar Tanggungan Negara

.2 .1 Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji

.2 .2 Eselon 1

.2 .3 Eselon 2

.2 .4 Eselon 3

.3 Eselon 4

Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji

822 .1 Kenaikan Gaji Berkala

.2 PNS Golongan I

.3 PNS Golongan II

.4 PNS Golongan III

PNS Golongan IV

823 .1 Kenaikan Pangkat

.2 PNS Golongan I

.3 PNS Golongan II

.4 PNS Golongan III
PNS Golongan IV
824 .1 Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan
.2 PNS Golongan I
.3 PNS Golongan II
.4 PNS Golongan III
.5 PNS Golongan IV
Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
825 Datasering dan Penempatan Kembali
826 Penunjukan Tugas Belajar
.1 Dalam Negeri
.2 Luar Negeri
.3 Tunjangan Belajar
.4 Penemnpatan Kembali
827 Wajib Militer
828 Mutasi Pegawai Instansi Lainnya

830 KEDUDUKAN
Peninjauan Masa Kerja
831 Perhitungan Masa Kerja
832 Penyesuaian Perangkat / Gaji
.1 PNS Golongan I
.2 PNS Golongan II
.3 PNS Golongan III
.4 PNS Golongan IV
833 Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)
834 Penghargaan Lainnya

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
841 .1 Tunjangan
.2 Struktural dan Fungsional
.3 Kehormatan
.4 Dana Kematian (uang duka)
.5 Tambahan Penghasilan
Tunjangan Cacat
842 D a n a
.1 Taspen
.2 Akses, Bantuan kesehatan
.3 Bantuan Pendidikan
843 Perawatan Kesehatan
.1 Poliklinik, Klinik Konsultasi
.2 Perawatan Dokter
.3 Obat-obatan
.4 Keluarga Berencana
844 Koperasi
.1 Distribusi Pangan
.2 Distribusi Sandang
.3 Distribusi Lainnya
845 Perumahan PNS
.1 Perumahan Pegawai
.2 Tanah Kampling
.3 Losmen/Hotel

846 Bantuan Sosial
.1 Bantuan Kebakaran
.2 Bantuan Kebanjiran
847 Rekreasi
848 Dispensasi
850 C U T I
851 Cuti Tahunan
852 Cuti Besar
853 Cuti Sakit
854 Cuti Hamil
855 Cuti Naik Haji
856 Cuti Diluar Tanggungan Negara
857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting

860 PENILAIAN
861 Penghargaan
.1 Bintang / Satyalencana Karya Satya
.2 Kenaikan Pangkat Anumerta
.3 Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat
.4 Pegawai Teladan
862 Hukuman
.1 Teguran Peringatan
.2 Penundaan Kenaikan Gaji
.3 Penurunan Pangkat
.4 Pemindahan
.5 Ringan
.6 Sedang
.7 Berat
863 Konduite / DP3
864 Ujian Dinas
.1 Tingkat I
.2 Tingkat II
.3 Tingkat 3
865 Penilaian Kinerja
.1 Struktural
.2 Fungsional
866 Rehabilitasi

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871 Formasi
872 Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873 Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
.1 NIP
.2 KARPEG
.3 Legitimasi / Tanda Pengenal
.4 Daftar Keluarga
.5 KARSU / KARIS
874 Daftar Riwayat Pekerjaan
1 Tanggal Lahir
.2 Penggantian Nama
.3 Izin Kepartaian/Organisasi
876 Kewenangan Mutasi Kepegawaian

.1 Pelimpahan Wewenangan
.2 Spesimen Tanda Tangan
877 Penggajian
.1 SKPP
878 Sumpah/Janji
878 Korps Kepegawaian

880 PEMBERHENTIAN
881 Atas Permintaan Sendiri termasuk pengunduran diri
882 Dengan Hak Pensiun
.1 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. I
.2 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. II
.3 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. III
.4 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV
.5 Pensiun Janda / Duda
.6 Pensiun Yatim Piatu
.7 Uang muka Pensiun
883 Karena Meninggal
884 Alasan lain, diantaranya Keuzuran Jasmani
885 Uang Pesangon
886 Uang Tunggu
887 Uang Sementara Waktu
.1 Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas
888 Tidak dengan Hormat
.1 Tali Asih Pensiun

890 PENDIDIKAN PEGAWAI
891 Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
892 Pendidikan Prajabatan
893 Pendidikan dalam Jabatan
.1 Diklatpim
.2 Diklat Teknis
.3 Diklat Fungsional
.4 Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis
894 Pengembangan Pegawai
.1 Tugas Belajar
.2 Ijin Belajar
.3 Tunjangan Belajar
.4 Bantuan Pendidikan
.5 Penempatan Kembali
895 Metode
.1 Kuliah
.2 Ceramah, Symposium
.3 Diskusi
.4 Kuliah Lapangan / OL, Widya Wasta, KKN
.5 Kurikulum
.6 Karya Tulis
896 Tenaga Pengajar, Narasumber
897 Administrasi Pendidikan
898 Fasilitas Pendidikan
.1 Tunjangan Belajar
.2 Asrama

.3 Uang Makan
.4 Uang Transport
.5 Uang Buku
.6 Uang Ujian
.7 Uang Semester/Uang Kuliah
.8 Uang Saku

899 Sarana Pendidikan
.1 Bantuan Sarana Belajar
.2 Bantuan Alat Tulis
.3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya

900 KEUANGAN
901 Nota Keuangan
902 APBN
903 APBD
904 Dana Alokasi Umum
905 Dana Alokasi Khusus

910 ANGGARAN
911 Keputusan ttg penunjukkan pengelola keuangan SKPD / PPKD
912 Keputusan Gubernur ttg Penunjukkan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat teknis BLUD
913 DPA / DPPA / DPAL - SKPD / PPKD
914 Anggaran Kas
915 Surat Penyediaan Dana (SPD)
916 Rutin
917 Pembangunan
918 Daftar Isi Kegiatan (DIK)
.1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
919 Daftar Isian Proyek
.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
.2 Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)

920 OTORISASI/SKO
921 Rutin
922 Pembangunan
923 SUP
924 Ralat SKO

930 AKUNTANSI
931 Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

940 PERBENDAHARAAN
941 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
942 Surat Penolakan Penerbitan SP2D
943 Daftar Penguji SP2D

950 PEMBINAAN PERBENDAHARAAN
951 Bintek-bintek / Kursus yang berkaitan dengan Keuangan

960 PENGELOLAAN KAS DAERAH
961 Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
962 Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah

963 Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN / PPh) dari CV / PT / Instansi
964 Surat Tanda Setoran (STS)
965 Laporan Realisasi Daerah
.1 Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
.2 Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
966 Rekonsiliasi
.1 Surat Rekonsiliasi Penerimaan
.2 Laporan Rekonsiliasi Bank
967 Laporan Mutasi Penempatan Deposito
968 Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)

970 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
971 Tuntutan Ganti Rugi
972 Tuntutan Perbendaharaan
973 Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
974 Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
975 Edaran -edaran

980 PENDAPATAN
981 Perimbangan Keuangan
.1 Bagi Hasil Pajak
.1 Pajak Bumi Bangunan (PBB)
.2 Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
.1 Sumber Daya Alam / Migas
982 Subsidi
983 Pajak
.1 Pajak Kendaraan Bermotor
.2 Pajak Kendaraan Diatas Air
.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
.4 Pajak Pengembalian & Pemanfaaatan Air Permukaan
.5 Pajak Reklame
984 Restribusi
.1 Restribusi Bidang Kesehatan
.2 Restribusi bidang seni budaya dan pariwisata
.3 Restribusi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar)
.4 Restribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)
.5 Restribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll)
.6 Restribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
.7 Restribusi bidang perikanan dan kelautan
.8 Restribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi
.9 Restribusi bidang lainnya (termasuk sampah)
985 Bea
.1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
.2 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air

986 Cukai
987 Pungutan
988 Bantuan
.1 Bantuan Presiden
.2 Bantuan Menteri
.3 Bantuan Gubernur
.4 Bantuan Bupati
.5 Bantuan Lainnya
989 Pendapatan Lainnya
.1 Hasil Penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
.1 Pelepasan Hak Atas Tanah
.2 Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas
.3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
.4 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
.5 Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
.6 Penjualan Drum Bekas
.7 Penjualan Hasil Penerbangan Pohon
.2 Penerimaan Jasa Giro
.1 Jasa Giro Kas Daerah
.2 Jasa Giro Pemegang Kas
.3 Jasa Giro Khusus
.3 Penerimaan Bunga Bank
.1 Bunga Deposito
.2 Bunga Tabungan
.4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan
.1 Sumbangan Pihak Ke Tiga
.2 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
.3 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
.5 Penerimaan Lain-lain
.1 Penerimaan kembali kredit BKK
.2 Ternak tidak layak bibit
.3 Sewa Internet
.4 Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving
.5 Kerjasama Dengan BUMIDA
.6 Penerimaan DUKS
.7 Tempat Rekreasi Nusakambangan
.8 Setoran TP-TGR
.9 Penerimaan Lainnya dari setda / SKPD

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO